

Majalah



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA

Menata Lagi Penyelenggaraan Haji



EDISI 247
TH. 2025



eMedia
DPR RI

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom, M.A. (Kasubag Analis Media)

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Agung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi, Mario Fernandez

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Darmawan

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi), Adi Ardiansyah, MM

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

LAPORAN UTAMA

Menata Kembali Penyelenggaraan Haji



4

PROLOG

Menata Kembali Penyelenggaraan Haji

6

LAPORAN UTAMA

- Revisi UU Haji Untuk Transparansi
- Reformasi Total Penyelenggaraan Haji
- Legislasi Haji Harus Adaptif
- Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Haji 2025

14

SUMBANG SARAN

Haji 2025 : Simbol Kesatuan Ummat dan Kekuasaan Pemerintah

18

PENGAWASAN

Mengawal Ketat Batas Wilayah

20

ANGGARAN

BGN Jadi Instansi Terkaya 2026

22

LEGISLASI

KUHAP Baru: Dari Suara Rakyat ke Ruang Rapat

24

FOTO BERITA

28

PROFIL

Irsan Sosiawan
Mengabdikan Untuk Rakyat



PENGAWASAN

**Mengawal
Ketat Batas
Wilayah**

18 PIMPINAN KOMISI II DPR RI

SOROTAN

**58 Penulisan Ulang Sejarah
Butuh Partisipasi Publik**

ANGGARAN

**Optimisme
Mengejar
Target
Pertumbuhan
Ekonomi
5,8 Persen**

20

32 KUNKER

58 SOROTAN

Penulisan Ulang Sejarah Butuh
Partisipasi Publik

60 LIPUTAN KHUSUS

Standar Ganda Legislator Inggris

62 DAPIL

70 PERNIK

Festival Literasi Parlemen 2025:
Edukatif dan Rekreatif

72 KIAT SEHAT

Buku Kesehatan Ibu Anak:
Bukan Buku Pink Biasa

74 WISATA

Melaju ke Masa Lalu:
Ambarawa dan Romantika
Kereta Tempo Dulu

76 LENSEA PARLE

Ayo Sekolah

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri

www.dpr.go.id

Menata Kembali Penyelenggaraan Haji

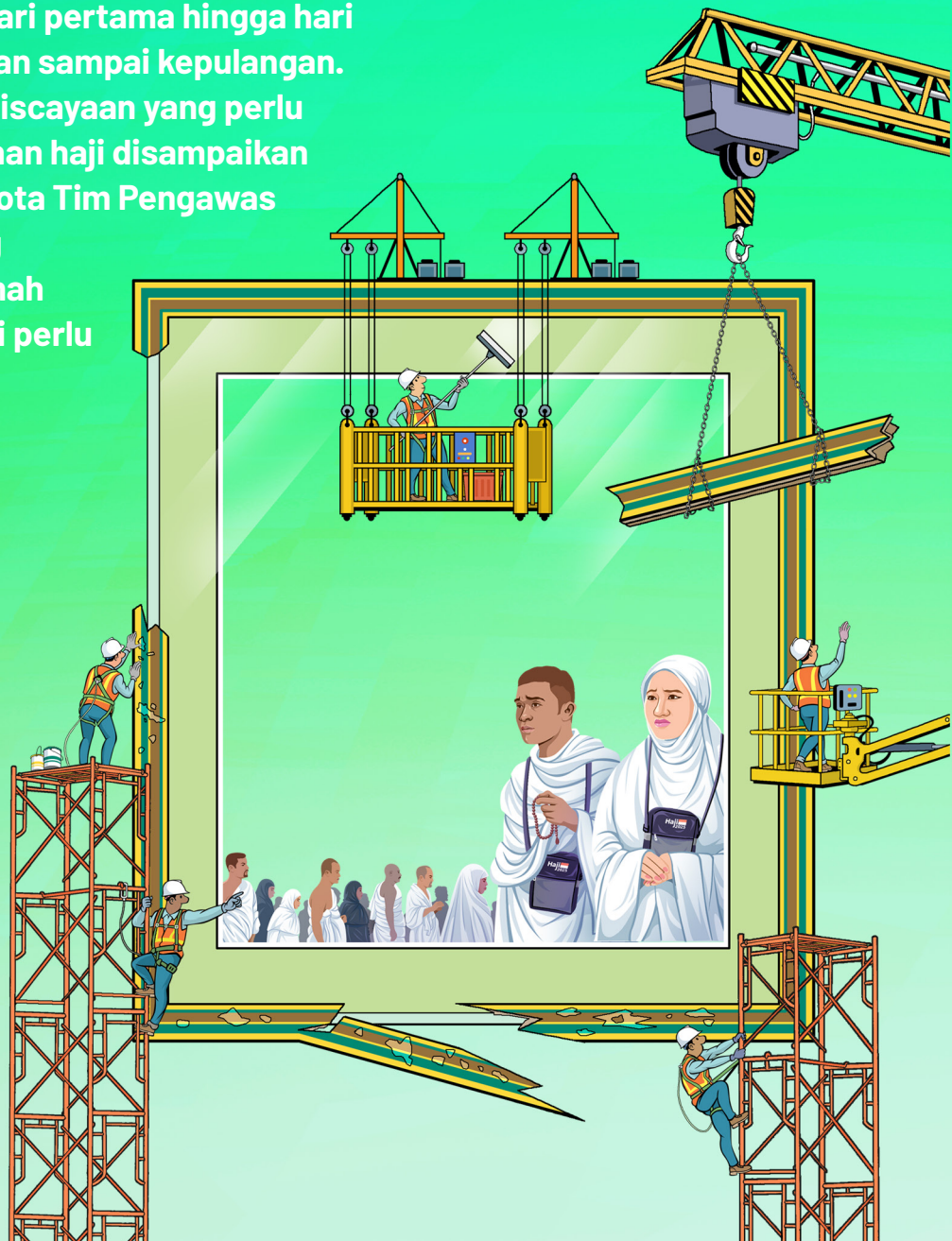
Sekali lagi penyelenggaraan haji perlu dievaluasi menyeluruh. Ada banyak temuan selama penyelenggaraan haji dari hari pertama hingga hari terakhir, dari keberangkatan sampai kepulangan. Revisi UU Haji juga jadi keniscayaan yang perlu dilakukan. Kritik atas layanan haji disampaikan bergantian oleh para anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, yang memantau langsung di Tanah Suci. Penyelenggaraan haji perlu ditata kembali.



TERNYATA, layanan haji tahun ini masih jauh dari ekspektasi publik. Suara kritis disampaikan Anggota Timwas Haji

Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Kekecewaan mendalam disampaikan Sigit yang melihat langsung penyelenggaraan haji di Tanah Suci. Sebelumnya, ia sempat melontarkan optimesmenya bahwa penyelenggaraan haji 2025 akan berjalan jauh lebih baik daripada tahun 2024. Apalagi, ini adalah penyelenggaraan haji pertama di era Prabowo Subianto menjabat presiden.

"Saya sebagai anggota DPR RI, yang paling percaya diri bahwa pelaksanaan haji tahun ini bakal keren, bakal bagus. Dalam rapat-rapat



Komisi VIII sebelumnya, saya selalu bilang, insyaallah, di era pertama Pak Prabowo menjabat, haji ini pasti akan jadi yang terbaik,” seraya menambahkan, “Ini memalukan. Apa yang terjadi di Armuzna dan pasca-Armuzna sudah sangat ramai di media. Saya pastikan, jika persoalan serupa masih terjadi di Madinah, saya akan jadi orang pertama yang mengecam langsung Kepala Daker Madinah saat evaluasi di Komisi VIII nanti,” tandasnya.

Kenyataan di lapangan berkata lain. Politisi PAN itu, menyinggung berbagai persoalan yang muncul, terutama pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta fase pasca-Armuzna yang penuh keluhan dari para jemaah. “Ini soal kemanusiaan, soal tanggung jawab. Kami di DPR punya konstituen, punya daerah pemilihan, dan kami tidak bisa tinggal diam saat rakyat kami mengalami penderitaan dalam ibadah seumur hidupnya,” keluhnya.

Kritik tajam juga disampaikan Anggota Timwas lainnya Edy Wuryanto. Ia menyoroti tingginya angka kematian jemaah haji asal Indonesia, khususnya dari kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta. Edy menyampaikan, Pemerintah Arab Saudi mengeritik otoritas penyelenggara haji Indonesia, soal tingginya angka kematian ini.

“Masukan dari Pemerintah Arab Saudi harus menjadi perhatian serius. Mereka bahkan menyampaikan pertanyaan keras: ‘Why do you bring people to death here?’ Mengapa Anda kirim jemaah ke sini hanya untuk meninggal?” kata Edy usai kunjungan Timwas Haji DPR RI ke Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Juni silam. Tingginya angka kematian harus direspon dengan penguatan seleksi kesehatan. Ini

harus dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan, bukan hanya saat pendaftaran haji.

“Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya, termasuk dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota, harus lebih ketat dalam menyeleksi calon jemaah. Syarat istitha’ah atau kemampuan fisik harus menjadi prioritas. Terutama bagi lansia yang memiliki penyakit kompleks, apalagi penyakit yang diprediksi tidak mampu menyelesaikan seluruh rukun haji. Mereka sebaiknya tidak diberangkatkan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembayaran biaya haji yang dilakukan sejak 10–15 tahun sebelumnya tidak bisa dijadikan patokan untuk keberangkatan. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan ulang menjelang keberangkatan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi keselamatan jemaah. Dan pada 2025 ini, ada 235 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. “Skrining itu harus dilakukan sebelum berangkat. Kalau ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, bisa digantikan oleh anak atau kerabatnya. Skema penggantian ini harus mulai disosialisasikan,” jelas Edy yang juga Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Para petugas haji juga tidak lepas dari sasaran kritik Timwas. Satori, Anggota Timwas DPR mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH). Menurutnya, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih oleh Badan Pengelola Haji (BP Haji).

“Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami

kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris,” ujar Satori kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Juni lalu.

Sementara soal UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, memang harus segera direvisi untuk mengakomodir banyak temuan evaluasi dan merespon kemajuan zaman. Revisi juga perlu dilakukan pada UU Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi dua regulasi ini akan menjadi tonggak baru sejarah pengelolaan haji.

Di balik deretan pasal yang tengah diharmonisasi, ada semangat besar, mewujudkan ibadah haji yang lebih aman, murah, dan bermartabat. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, menyebutkan bahwa penyempurnaan regulasi ini tak bisa ditunda. Ia menegaskan penting memperkuat aspek kesehatan sebagai salah satu kriteria utama keberangkatan.

“Saudi sudah menekankan bahwa istitha’ah (kemampuan) kesehatan itu harus betul-betul ditegaskan. Ini jadi catatan penting bagi kami,” ujarnya. Lebih lanjut, pelatihan petugas haji juga menjadi sorotan. Bukan sekadar formalitas, tetapi kompetensi. “Petugas itu minimal tiga bulan training. Kalau tidak lulus, ya tidak berangkat,” tegas Marwan.

Begitulah kritik dan evaluasi yang harus direspon pemerintah dalam penyelenggaraan haji. DPR RI sebagai dapur regulasi sudah meresponnya dengan merevisi semua regulasi menyangkut haji. Para jemaah haji Indonesia yang mendarat di Tanah Suci harus dengan kesehatan paripurna, bukan malah merana. Kita tak mau ada begitu banyak jemaah haji yang sekarat. Justru kita ingin menghadirkan jemaah haji Indonesia yang bermartabat. Evaluasi pun jadi kata kunci yang tak bisa dihindari.



Revisi UU Haji Untuk Transparansi

Di tengah ikhtiar meningkatkan kualitas layanan haji bagi jutaan umat Islam Indonesia, DPR RI menempuh jalan sunyi yang tidak selalu disorot publik: revisi regulasi. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta UU Pengelolaan Keuangan Haji kini menjadi tonggak baru dalam sejarah pengelolaan ibadah haji nasional.



DI balik deretan pasal yang tengah diharmonisasi, ada semangat besar: mewujudkan ibadah haji yang lebih

aman, murah, dan bermartabat. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, menyebutkan bahwa penyempurnaan regulasi ini tak bisa ditunda. Ia menegaskan penting memperkuat aspek kesehatan sebagai salah satu kriteria utama keberangkatan.

"Saudi sudah menekankan bahwa istitha'ah (kemampuan) kesehatan itu harus betul-betul ditegakkan. Ini jadi catatan penting bagi kami," ujarnya. Lebih lanjut, pelatihan petugas haji juga menjadi sorotan. Bukan sekadar formalitas, tetapi kompetensi. "Petugas itu minimal tiga bulan training. Kalau tidak lulus, ya tidak berangkat," tegas Marwan.

Namun, revisi ini bukan hanya soal kesehatan atau pelatihan. Ada ambisi lebih besar: menjadikan

otoritas Arab Saudi, tanpa harus terus-menerus melalui Kementerian Agama," katanya.

Menyatukan Naskah, Merumuskan Masa Depan

Di balik layar, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kini tengah merumuskan gagasan untuk menjadi payung hukum yang solid. Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia, menyebutkan bahwa revisi ini masih perlu sinkronisasi mendalam. "Banyak yang masih terlalu terpusat pada Kementerian Agama. Kami ingin distribusi kewenangan yang lebih proporsional," jelasnya. Target harmonisasi pun dikejar cepat—dalam dua pekan sejak akhir Juni. Bila rampung, draf revisi akan dibahas



Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebagai institusi yang mandiri dan setara kementerian. Ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi sebuah langkah diplomatik yang strategis. "Dengan posisi yang lebih kuat, BP Haji dapat melakukan komunikasi langsung dengan

dalam rapat gabungan bersama Menteri Agama, BPKH, dan BP Haji.

Satu kabar baik juga muncul dari meja parlemen: penurunan biaya haji. Setelah kalkulasi panjang, DPR dan pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 neto sebesar Rp55,43

juta, jauh lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp90 juta. Kebijakan ini menjadi angin segar di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap tingginya biaya haji.

Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, menyampaikan bahwa revisi UU juga akan mencakup pengelolaan properti investasi di Arab Saudi, termasuk hotel dan katering. "Kalau

“

Pelatihan petugas haji juga menjadi sorotan. Bukan sekadar formalitas, tetapi kompetensi. Petugas itu minimal tiga bulan training. Kalau tidak lulus, ya tidak berangkat

Abdul Wachid
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI



Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia.

kita bisa investasi langsung, kita tak harus sewa terus. Ini bisa menekan biaya dan memperbaiki pelayanan," ujarnya.

Dengan jumlah jemaah haji 2025 yang mencapai 221.000 orang, termasuk 17.680 haji khusus, revisi ini bukan hanya menyangkut aspek teknis. Ini adalah soal keadilan, profesionalisme,

“

Revisi UU juga akan mencakup pengelolaan properti investasi di Arab Saudi, termasuk hotel dan katering.

Ahmad Doli Kurnia
Wakil Ketua Baleg DPR RI



Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid.

dan amanah publik. DPR ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana haji dikelola dengan transparan, dan setiap jemaah diperlakukan dengan bermartabat.

Perjalanan menata ulang regulasi haji mungkin tidak spektakuler secara visual. Tapi, di balik meja rapat, dalam ayat-ayat revisi, tersimpan tekad untuk memperbaiki ibadah yang menjadi impian seumur hidup bagi jutaan umat. Sebab haji, bagi Indonesia, bukan sekadar ibadah—ia adalah amanah. ssb/mh

Reformasi Total Penyelenggaraan Haji



Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat pemantauan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.



PERSOALAN

teknis dan manajerial turut mencuat. Rasio tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah,

distribusi kartu identitas digital yang terlambat, serta ketimpangan dalam pembagian beban kerja petugas jadi persoalan. Kritik juga datang terhadap penggunaan visa non-haji yang menyebabkan sejumlah jemaah tertahan atau dideportasi oleh otoritas Arab Saudi. Semua ini memperkuat desakan terhadap pemerintah untuk melakukan

Penyelenggaraan ibadah haji 2025 kembali menyisakan sejumlah persoalan serius yang menjadi sorotan publik. Berbagai laporan dari lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan jemaah Indonesia masih jauh dari memadai. Di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)—tiga lokasi krusial puncak haji—banyak jemaah yang mengeluhkan minimnya fasilitas, tenda yang sempit, keterlambatan konsumsi, serta sanitasi yang buruk.

reformasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji.

Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, saat pertemuan dalam kegiatan pengawasan ibadah haji 2025 di Makkah.

bahwa opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji masih dikaji menyusul temuan-temuan yang dinilai perlu pendalaman lebih lanjut, terutama menyangkut pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. "Pansus itu dibentuk untuk pendalaman atau penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Seperti tahun 2024 lalu, Pansus dibentuk karena ada pelanggaran pembagian kuota haji tambahan antara haji reguler dan haji khusus," jelas Cucun.

Ia menambahkan, Timwas masih mengumpulkan data dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aspek pelayanan, manajemen, dan kepatuhan regulasi. Jika ditemukan pelanggaran signifikan, pembentukan Pansus bisa segera diusulkan lintas fraksi dan alat kelengkapan dewan. Cucun juga mengingatkan, prinsip utama penyelenggaraan haji adalah keterbukaan, efisiensi, dan perlindungan jemaah.

Evaluasi haji 2025 menjadi penting untuk memastikan tidak terulangnya pelanggaran kuota maupun kesalahan manajerial yang merugikan jemaah. "Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, kami tidak akan ragu melibatkan Komisi III DPR RI dan aparat penegak hukum," tandasnya. Timwas, lanjutnya, akan menyusun laporan lengkap berbasis temuan lapangan dan aduan masyarakat. Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan apakah penyelidikan akan ditindaklanjuti dalam bentuk Panja atau Pansus lintas komisi.

Layanan Armuzna Dinilai Belum Layak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyebutkan bahwa layanan jemaah Indonesia di Armuzna masih dikategorikan dalam Grade-D. Ia mendorong peningkatan standar layanan menjadi Grade-C atau B, tanpa menambah biaya jemaah. "Ada penyedia yang meski diberi anggaran Grade-D, mampu memberi layanan Grade-B. Ini bukti bahwa peningkatan kualitas itu memungkinkan tanpa menambah beban jemaah," kata Wachid.

Wachid mendorong kontrak jangka panjang untuk pemondokan di kawasan khusus Indonesia agar efisien dan terkontrol dengan baik. Menurutnya, peningkatan layanan tidak sekadar soal anggaran, tetapi lebih pada pengelolaan yang transparan dan profesional. DPR RI, lanjutnya, telah mengusulkan agar Pemerintah Indonesia memiliki pemetaan dan kontrol terhadap syarikah yang bertanggung jawab atas pelayanan jemaah.

Ia juga menekankan pentingnya audit layanan tahunan di kawasan Armuzna. Audit tersebut harus terbuka untuk publik dan melibatkan lembaga independen, agar kualitas pelayanan benar-benar dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahun.

Petugas Haji Perlu Disertifikasi

Masalah serius lainnya adalah ketimpangan antara jumlah jemaah dan tenaga medis. Anggota Timwas Haji Rokhmat Ardiyan mencatat satu dokter dan satu perawat harus melayani lebih dari 400 jemaah. Ini sangat membahayakan. "Petugas medis kelelahan, bahkan jatuh sakit. Ini harus jadi alarm. Kita butuh sistem rekrutmen dan pelatihan yang seragam, khususnya bagi petugas medis," ungkap Rokhmat.

Ia menyerukan standarisasi kerja bagi seluruh petugas haji, serta



Anggota Timwas Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan, saat pengawasan ibadah haji di Madinah, Arab Saudi.

perbaikan distribusi kerja antara petugas medis dan nonmedis. Rokhmat mendesak Kementerian Agama, Kemenkes, dan Kemenpan-RB membuat kurikulum pelatihan terpadu bagi seluruh petugas haji. Menurutnya, pelatihan yang ada saat ini belum menyentuh aspek krisis dan psikologi jemaah secara mendalam.

rdn/mh

Legislasi Haji Harus Adaptif

Merumuskan regulasi haji dituntut adaptif terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi di Arab Saudi. Kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi soal penyelenggaraan haji juga harus direspon cepat oleh pemerintah dan DPR RI. Sebagai dapur legislasi, DPR memang harus merumuskan produk legislasi yang adaptif.



Anggota Timwas Haji Abidin Fikri, saat mengikuti rapat bersama Daker Madinah, Arab Saudi.



SETELAH melihat penyelenggaraan haji 2025, banyak temuan menarik dan mutakhir yang harus direspon cepat para pembuat

kebijakan di Indonesia. Bila UU Haji di Indonesia tidak lagi memadai menghadapi perkembangan mutakhir soal haji, bisa segera direvisi. Saat ini ada dua UU menyangkut haji, yaitu UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan, pentingnya percepatan revisi dua undang-undang utama tersebut.

"Banyak jemaah dideportasi karena visa tak sesuai. Ini sinyal bahwa regulasi kita harus adaptif. Pengelolaan keuangan haji juga harus memberi manfaat langsung kepada ekosistem layanan jemaah," jelas Abidin.

Revisi tersebut juga diharapkan mampu mendorong investasi strategis dalam layanan penginapan, konsumsi, dan transportasi haji.

Abidin menekankan bahwa ekosistem haji tidak hanya berhenti pada ibadah, tapi juga mencakup logistik, pelatihan SDM, hingga

FOTO: RIDWAN/VEL



Anggota Timwas Haji DPR RI Marwan Dasopang saat pengawasan ibadah haji di Mina dan Makkah.

FOTO: RIDWAN/VEL

teknologi informasi. Ia berharap UU baru nantinya bisa mengatur skema pembagian peran antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan dalam mendukung sistem haji nasional.

Ia juga menyuarakan perlunya badan pengelola yang fleksibel namun akuntabel, serta pembukaan peluang kerja sama investasi antarnegara untuk mendukung kebutuhan fasilitas jemaah secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan, Pemerintah Arab Saudi sedang merancang transformasi digital haji menuju 2030 dengan target lima juta jemaah per tahun. Sistem digital mandiri ini dapat mengancam otoritas Indonesia jika tidak diantisipasi.

"Kalau sistem Saudi memungkinkan jemaah berhaji tanpa melalui pemerintah Indonesia, kita tak punya data, tak bisa melindungi mereka," kata Marwan. Ia meminta

pemerintah segera menjalin kesepakatan teknis dengan Saudi dan membangun sistem perlindungan

Banyak jemaah dideportasi karena visa tak sesuai. Ini sinyal bahwa regulasi kita harus adaptif. Pengelolaan keuangan haji juga harus memberi manfaat langsung kepada ekosistem layanan jemaah

Abidin Fikri
Anggota Timwas Haji DPR RI

jemaah Indonesia yang komprehensif.

Marwan menilai bahwa penggunaan aplikasi haji yang tidak melalui otoritas Indonesia akan membuka peluang maraknya jemaah ilegal, serta mempersulit negara memberikan bantuan jika terjadi insiden.

Ia juga mengusulkan agar Indonesia membentuk pusat informasi digital khusus untuk jemaah haji yang terkoneksi langsung dengan sistem informasi Saudi. Hal ini akan membantu deteksi dini masalah lapangan dan memperkuat perlindungan WNI di luar negeri.

Dengan evaluasi menyeluruh dari DPR RI melalui Timwas Haji, reformasi sistem penyelenggaraan haji menjadi keniscayaan. Harapannya, ibadah haji ke depan tak hanya menjadi pengalaman spiritual, tetapi juga pengalaman yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia. **rdn/mh**

Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Haji 2025

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Salah satu fokus utama Timwas adalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji di tahun sebelumnya, 2024.



PROSES hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH), bila ditemukan unsur pidana. Anggota Timwas Haji DPR

RI Selly Andriany Gantina yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR dalam memastikan

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami membuat beberapa catatan rekomendasi, salah satunya menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum. Ini penting untuk menyempurnakan penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK," ujar Selly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Juni silam.

Selly menambahkan, KPK sangat memungkinkan untuk memanggil semua pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan

haji, termasuk pejabat yang saat ini masih menjabat di Kementerian Agama. Ia menyebut, meskipun sejumlah pejabat eselon telah dimutasi, masih ada posisi strategis yang diisi oleh orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam penyelenggaraan Haji 2024.

"Baik Menteri Agama sebelumnya, maupun Dirjen Haji yang masih menjabat, perlu dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian juga dengan beberapa pejabat eselon II dan III," ungkapnya.



Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina saat mengikuti pemantauan ibadah haji di Makkah.

FOTO: TAUFIK/VEL

Lebih lanjut, Selly menyoroti ada jemaah reguler yang haknya dialihkan ke jemaah haji khusus. Ia menyatakan bahwa hal ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bisa berdampak hukum jika terbukti ada unsur jual beli kuota.

"Ini bukan uang kecil, melainkan dana dalam jumlah besar yang perlu dipertanggungjawabkan. Apabila ada praktik jual beli kuota atau pengelolaan dana haji oleh oknum tertentu, itu harus diusut tuntas. Kami serahkan kepada APH," tegas legislator dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Timwas Haji DPR RI berkomitmen terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberpihakan kepada jemaah, serta menjamin tidak adanya penyimpangan yang merugikan negara dan umat.

Profesionalitas Petugas Haji

Anggota Timwas Haji DPR RI Satori, mendorong pemerintah mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH). Menurutnya, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih oleh Badan Pengelola Haji (BP Haji).

"Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris," ujar Satori kepada Parlemenaria di Makkah, Arab Saudi, Juni lalu.

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan petugas,

termasuk pemberian pelatihan yang memadai sebelum bertugas. "Petugas haji harus dievaluasi. Jangan sampai komunikasi mereka terputus di lapangan hanya karena SDM yang tidak siap. Apalagi, setelah Armuzna, aktivitas petugas malah cenderung menurun. Padahal, mereka seharusnya membantu memfasilitasi pengadaan makanan bagi jemaah," kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Saat ditanya soal dorongan dari Komisi VIII DPR RI terhadap penerapan *merit system*, Satori membenarkan. "Ya, kami dari Komisi VIII, sebagai mitra Kementerian

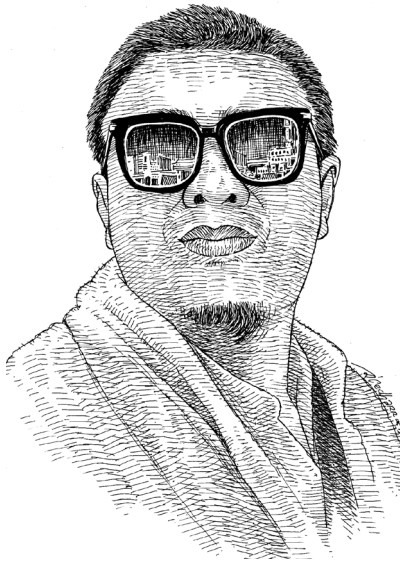
Agama, mendorong agar ke depan, ketika penyelenggaraan haji sudah dilakukan oleh BP Haji, pengadaan tenaga petugas dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kemampuan," ujarnya.

Ia menyebut, peningkatan kualitas SDM petugas sangat penting demi memastikan pelayanan terhadap jemaah semakin baik. "SDM-nya harus ditingkatkan agar pelayanan kepada jemaah lebih optimal. Tahun ini kita bisa melihat, petugas di lapangan masih harus dimaksimalkan lagi dalam mendampingi jemaah, terutama di fase pasca-Armuzna," tegasnya.  tn/mh



Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, saat pemantauan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.

FOTO: RIDWAN/VEL



Oleh:

Indra Martian Permana

Dosen Pascasarjana UIKA Bogor &
Jamaah Haji Tahun 2025

Haji adalah Kenikmatan

Langit Mekkah itu terasa berbeda untuk saya dan istri dan mungkin untuk seluruh jamaah haji. Dua kali melaksanakan ibadah umroh namun keberangkatan ini terasa spesial karena kami mendapat panggilan dan menjadi tamu Allah SWT untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami merasakan betul bahwa haji adalah kenikmatan, anugerah dan panggilan Allah kepada hambanya bukan lagi berbicara kemampuan finansial karena tidak sedikit yang tidak mempunyai finansial bisa melaksanakan ibadah haji. Namun yang memiliki finansial yang cukup bahkan berlebih justru tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji seperti yang menimpa jamaah haji furoda tahun ini yang visa haji furodanya tidak dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga, sudah sepantasnya kami bersyukur atas anugerah dan kenikmatan ini.

*Labbaikallaahumma labbaik,
labbaik laa syariika laa labbaik,*

Haji 2025 : Simbol Kesatuan Ummat dan Kekuasaan Pemerintah

*innal hamda wa ni'mata laka wal
mulk, laa syariika lak.*

Haji Simbol Kesatuan Ummat

Haji adalah simbol kesatuan ummat, dimana ummat Islam seluruh dunia bersama-sama melaksanakan ibadah haji pada waktu dan tempat yang sama. Tercatat ada 1.506.576 jamaah umat Islam seluruh dunia. Sedangkan jamaah haji Indonesia tercatat 221.000 jamaah terdiri 203.200 kuota jamaah regular 17.680 Jamaah haji khusus. Jamaah haji Indonesia saya catat bertambah banyak dengan adanya kuota haji dakhili, kuota haji untuk orang asing yang mukim tinggal di Arab Saudi baik sebagai pekerja maupun pelajar, dan saya menemukan banyak jamaah Indonesia dengan visa haji dakhili ini dan jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini adalah yang terendah dari 30 tahun penyelenggaraan ibadah haji (HImpuh, 2025)

Arab Saudi sebagai penyelenggara haji menurunkan jamaah haji 160.000 jamaah haji dari tahun 2024 bukan tanpa maksud dan tujuan. Pemerintah Arab Saudi menghendaki penyelenggaraan haji tahun 2025 yang merupakan simbol kesatuan umat Islam seluruh

dunia dan pelaksanaan rukun Islam yang kelima berjalan dengan penuh hidmat, kekhusuan, dan tertib. Tidak heran pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam mengeluarkan visa termasuk akses pintu masuk ke tanah haram. Tercatat terjadi pemeriksaan yang sangat ketat di jalanan menuju tanah haram, dari Jeddah 3 kali pemeriksaan, dari Riyadh dan Madinah 7-8 kali pemeriksaan ini sebuah upaya maksimal yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi agar pelaksanaan ibadah haji berjalan tertib, lancar, khusyuk.

“

**Haji adalah simbol
kesatuan ummat,
dimana ummat
Islam seluruh dunia
bersama-sama
melaksanakan
ibadah haji pada
waktu dan tempat
yang sama.**

Haji adalah Kekuasaan Pemerintah

Haji adalah kekuasaan pemerintah, karena jemaah haji Indonesia terkhusus jemaah haji regular dan khusus sangat bergantung dengan aturan, kebijakan dan pelaksanaannya tergantung semuanya dengan pemerintah. Baik dan buruknya ibadah haji jemaah

Indonesia tergantung dengan baik dan buruknya pengelolaan haji oleh pemerintah Indonesia, Haji tahun 2025 adalah haji terakhir yang dilaksanakan di bawah Kementrian Agama karena tahun 2026 urusan ibadah haji akan diurus oleh Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk

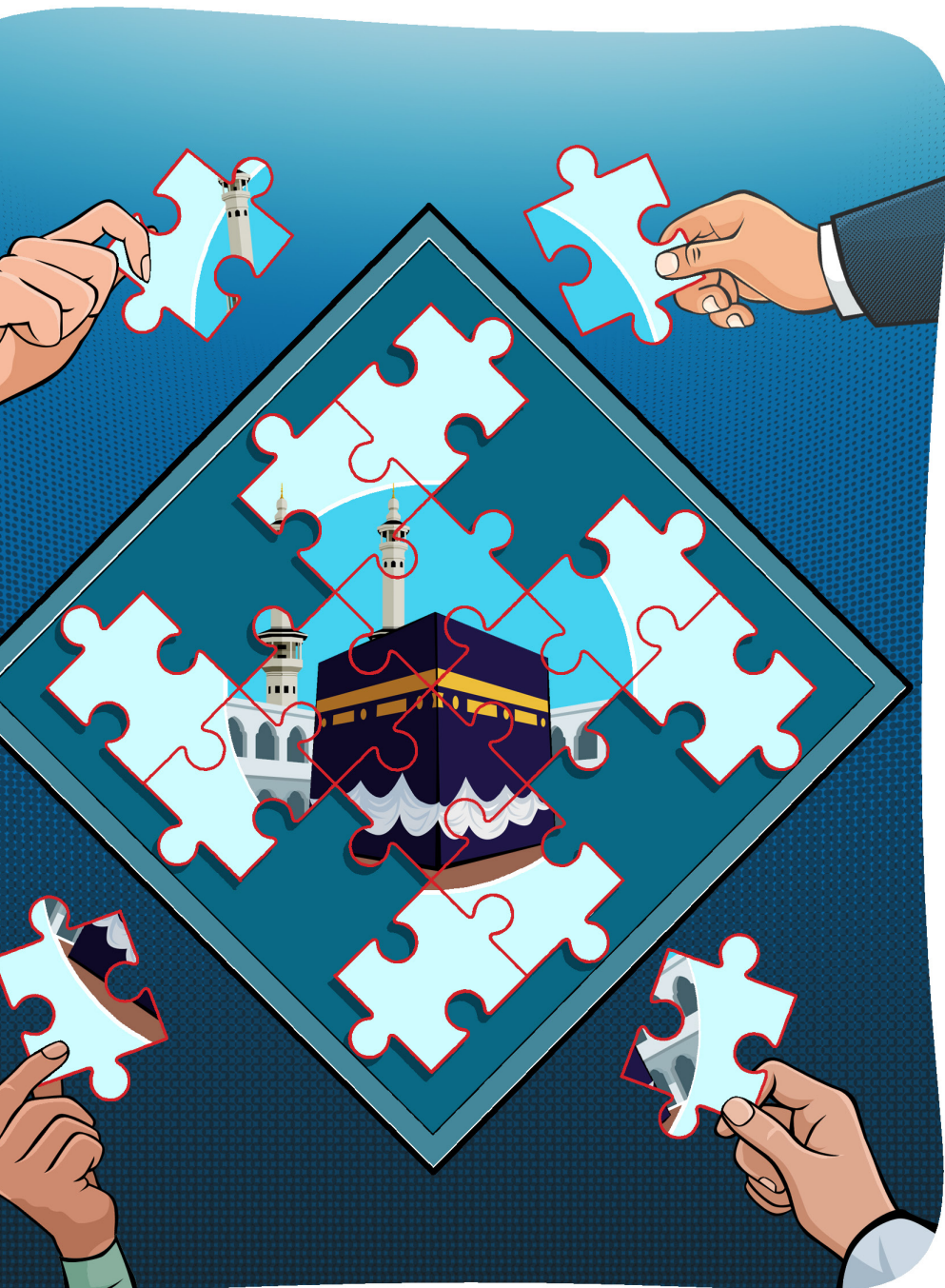
mengurusi urusan haji. Penulis tentu mengapresiasi langkah pemerintah tersebut agar urusan haji semakin baik, apalagi Pemerintah Presiden Prabowo sedang mengupayakan agar terealisasinya pembangunan kampung haji di tanah suci. Namun izinkan penulis memberikan masukan untuk evaluasi haji tahun 2025 dan sebagai upaya masukan kepada BP Haji untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 :

Hilangkan Mafia Haji

Haji adalah ibadah yang agung, namun banyak yang melirik karena di sana terdapat perputaran uang yang besar. Kasus jemaah haji Heri Risdyanto yang mendadak visa hajinya dibatalkan adalah satu bukti adanya praktik mafia haji di kementerian yang bisa mengatur kuota jemaah haji yang bisa berangkat ke tanah suci. Haji percepatan hari ini marak dijual travel haji dengan memberikan kuota kepada orang baru yang sanggup bayar dengan nominal yang ditentukan pada hakikatnya adalah praktik pencurian kuota haji yang harusnya diberikan kepada yang memang sudah antri haji. Peran dan kekuasaan pemerintah perlu hadir dalam perkara ini dengan menindak mafia haji baik pejabat kementerian maupun travel yang bermain dalam jual beli kuota haji.

Petugas Haji yang Tidak Amanah dan Tidak Profesional

Yang menjadi catatan kedua saya dalam pelaksanaan ibadah haji tahu ini adalah petugas haji yang tugasnya mendampingi jemaah haji dipegang oleh orang yang tidak amanah dan tidak profesional. Tidak amanah karena petugas haji seringkali memanfaatkan momen ini hanya untuk dirinya saja melaksanakan ibadah haji tanpa melakukan pengawasan terhadap jemaah haji sedangkan tidak profesional petugas sering kali tidak mengetahui tupoksi



haji, ilmu pelaksanaan ibadah haji bahkan tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab sehingga ini menjadi masalah di lapangan ketika pelaksanaan haji. Kasus jemaah yang tersasar, terlambatnya koordinasi dengan pemerintah setempat karena tidak berbahasa Arab, bahkan ada kasus rombongan jemaah haji Bekasi nyaris tidak wukuf di Arafah karena petugas haji yang tidak amanah dan profesional. Penulis mengusulkan kepada pemerintah agar petugas haji tahun depan bisa dari kalangan akademisi / dosen yang bisa berbahasa Arab dan telah melaksanakan ibadah haji. Dosen sudah terbiasa mendidik orang dewasa dengan berbagai karakter

sehingga menjadi pertimbangan untuk membimbing jemaah haji yang memang dominan dari orang dewasa, sedangkan syarat bisa bahasa Arab dan sudah haji agar kemudian bisa bekerja secara profesional

Syarikah yang Banyak Membingungkan Jemaah

Di antara kebijakan pemerintah Arab Saudi adalah banyak menunjuk syarikah untuk pelaksanaan ibadah tahun ini. Kebijakan ini diambil agar jemaah haji bisa terlayani secara maksimal, namun kebijakan penunjukan banyak syarikah ini direpson sangat lambat oleh kementrian bahkan gagap



Visa hajinya dibatalkan adalah satu bukti adanya praktek mafia haji di kementrian yang bisa mengatur kuota jemaah haji yang bisa berangkat ke tanah suci.

dalam aplikasi pelaksanaan dan pengaturan kuota jemaah terhadap



syarikah-syarikah tersebut. Kasus seperti suami istri berpisah, orang tua yang sudah sepuh berpisah dengan anak yang mengasuhnya menjadi catatan tersendiri untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan

Pelayanan Distribusi Makanan dan Keterlambatan Transportasi Masalah Klasik Jemaah Haji

Yang menjadi catatan berikutnya adalah pelayanan distribusi makanan dan keterlambatan transportasi menjadi masalah tahunan jemaah haji. Makanan jemaah haji selain nutrisinya yang perlu diperhatikan juga jadwal ketepatan distribusinya, karena jemaah haji sedang melaksanakan peribadatan yang mayoritas mengurus fisik. Sedangkan transportasi yang membawa jemaah ke tempat peribadatan Armuzna (Arafah, Mudzaliyah dan Mina) menjadi penting untuk tidak terlambat karena beberapa tempat ibadah seperti wukuf di Arafah hanya dalam waktu habis dhuhur sampai maghrib. Catatan ada rombongan jemaah yang kemudian harus demo terlebih dahulu untuk dibawa wukuf di Arafah karena pihak petugas haji pemerintah terlambat menyediakan transportasi untuk mereka sehingga mereka baru sampai Arafah menjelang ashar, belum lagi keterlambatan transportasi yang membawa jemaah dari Mudzaliyah ke Mina sehingga jemaah harus jalan kaki puluhan kilo meter.

Haji Dakhili antara Peluang dan Masalah Baru

Haji dakhili yang merupakan kuota Arab Saudi untuk *mukimin* / orang yang tinggal di Arab Saudi disebabkan karena bekerja maupun studi. Penulis memperhatikan selain jemaah haji resmi pemerintah baik regular maupun khusus pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 diisi juga dari

jemaah haji dakhili. Dalam UU No. 8/2019 bahwa haji yang dikelola oleh pemerintah adalah haji regular dan haji plus. Sedangkan haji furoda diberikan pemerintah Arab Saudi kepada perorangan, namun banyak dikelola oleh travel yang mempunyai izin penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), namun pemerintah tetap mempunyai peran memberikan perlindungan hukum terhadap jemaah haji furoda.

Tidak disebutkannya haji dakhili dan masih dianggap ilegal oleh pemerintah, namun faktanya saya temukan banyak rombongan jemaah haji menggunakan visa ini yang melaksanakan ibadah haji tahun 2025 dan secara legalitas pemerintah Arab Saudi, mereka adalah legal tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tugas pemerintah adalah memberikan kuota sebanyak-banyaknya untuk umat Islam di Indonesia agar bisa melaksanakan ibadah haji, namun di sisi lain ada



Pelayanan distribusi makanan dan keterlambatan transportasi menjadi masalah tahunan jemaah haji

model visa dakhili yang tidak diakui bahkan dipersulit oleh pemerintah untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, seperti beberapa rombongan jemaah dakhili yang kemudian tidak diijinkan berangkat dari seluruh bandara internasional yang ada di Indonesia. Ini tentunya menjadikan kajian pemerintah dalam hal ini BP Haji ,

rombongan haji dakhili ini akhirnya diizinkan terbang asal membayar sejumlah nilai uang yang infonya dipergunakan untuk tiga institusi.

Penulis sepakat jika jemaah haji yang tidak memiliki dokumen haji (Tasreh haji, Nusukh, dll) untuk tidak diizinkan terbang karena pasti akan tidak bisa masuk tanah suci, tapi model visa dakhili ini mereka punya tasreh haji, nusukh bahkan mereka punya iqomah haji untuk tinggal di Arab Saudi , seharusnya diberikan izin untuk terbang melaksanakan ibadah haji.

Namun, jika visa haji dakhili ini kemudian dilegalkan oleh pemerintah seperti halnya visa furoda maka memang secara hukum mereka harus dilindungi pemerintah, karena seperti halnya visa furoda maka visa haji dakhili ini rawan kecurangan dari travel yang mengelola ini, penulis mendapatkan kasus tahun ini ada beberapa rombongan jemaah haji pengguna visa dakhili ini, akhirnya tidak mendapatkan pelayanan maksimal sebagaimana yang dijanjikan travel di awal keberangkatan seperti hotel, makanan, dan lain-lain. Rombongan jemaah ini mau mengadu namun ke siapa? karena menurut pemerintah pun masih ilegal.

Visa haji dakhili memiliki peluang menambah kuota dan meringankan pemerintah untuk membagi kuota haji, namun di sisi lain mempunyai potensi untuk bermasalah

Dan seperti penulis katakan di dalam judul , Haji 2025 simbol kesatuan umat dan kekuasaan pemerintah , maka hari ini kita perlu melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberikan mandat kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur urusan ibadah haji ini dengan sebaik mungkin, sehingga menjadikan ibadah haji umat Islam berjalan tertib, lancar, dan khushuk. Selamat bekerja pemerintah yang baru. Selamat bekerja BP Haji. 🙏

Mengawal Ketat Batas Wilayah

Polemik empat pulau yang sempit terjadi antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, menyisakan persoalan batas wilayah. Pulau-pulau kecil di wilayah NKRI pun harus dijaga ketat.

Publik sempat dihebohkan dengan polemik status empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun akhirnya pemerintah menetapkan keempat pulau tersebut secara administratif sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

Merespon sengketa tersebut, Komisi II DPR RI menyerukan, penyelesaian polemik batas wilayah seharusnya tidak berhenti sampai di sana. Komisi II pun ikut

menguatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam konteks mengawasi pulau-pulau kecil dan batas wilayah antarprovinsi yang berpotensi menimbulkan sengketa. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN dan

Kemendagri bertindak proaktif, agar tidak ada lagi celah yang merugikan negara.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi seluruh pulau di Indonesia. Menurutnya, saat ini masih ada lebih dari 17.000 pulau yang belum memiliki legalitas pertanahan yang sah.

"Kementerian ATR/BPN tidak boleh pasif. Mereka harus aktif mendata dan menyertifikasi 97 persen lebih pulau yang belum bersertifikat. Kalau tidak, celah ini bisa dimanfaatkan oknum-oknum nakal, termasuk WNA yang ingin menguasai pulau-pulau kecil secara ilegal," tegas Rifqi usai Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, awal Juli lalu.

Ketidakaktifan pemerintah dalam sertifikasi akan membuka celah bagi praktik-praktik komersialisasi pulau secara ilegal, bahkan melalui perjanjian perdata yang tidak memiliki kekuatan hukum pertanahan. Hal ini, menurut Rifqi, sangat berbahaya tidak hanya bagi aspek ekonomi nasional,



Ketua Komisi II DPR RI
Muhammad Rifqinizamy
Karsayuda.

FOTO: MUNCHEN/VEL

tetapi juga menyangkut ketahanan dan kedaulatan negara.

Lebih lanjut, Komisi II DPR RI juga membuka opsi merevisi seluruh undang-undang tentang provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Hal ini diungkapkan Rifqi saat ditanya mengenai langkah preventif agar sengketa batas wilayah tidak terus terulang di masa mendatang.

"Terkait wilayah, terutama batas-batas provinsi, kabupaten, dan kota, kami siap membahas ulang. Jika perlu, Komisi II akan mendorong revisi seluruh undang-undang provinsi, kabupaten, dan kota, agar batas wilayah menjadi jelas, sah, dan tidak menyisakan multitafsir," ungkapnya, Juni lalu.

Ia menambahkan, ketegasan dalam penetapan batas wilayah sangat penting, termasuk dengan merinci titik koordinat secara geospasial agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi maupun konflik

horizontal di lapangan.

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung rapat terbatas mengenai status empat pulau yang disengketakan mendapat apresiasi luas dari parlemen. Keputusan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keempat pulau tersebut sah menjadi bagian dari Provinsi Aceh, berdasarkan dokumen administratif yang sah dari Kemendagri, Setneg, serta dokumen historis dari Pemerintah Aceh.

Apresiasi kepada Presiden serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco

Ahmad patut diberikan, karena berperan aktif menjembatani komunikasi dan aspirasi antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun keputusan administratif telah ditetapkan, sejumlah anggota DPR RI menilai evaluasi tetap perlu dilakukan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan penyelesaian batas wilayah harus mempertimbangkan pendekatan multidisipliner, mulai dari spasial hingga sosiokultural masyarakat sekitar.

"Walaupun sudah ada keputusan, sebaiknya Kemendagri, Pemda Aceh, dan Pemda Sumut duduk bersama. Libatkan para ahli, lakukan dialog dan kajian terbuka agar keputusannya benar-benar *legitimate* secara hukum, sosial, dan teknis," tegas Zulfikar dalam wawancara dengan Parlementaria, Juni silam. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI,
Zulfikar Arse Sadikin.



PIMPINAN KOMISI II DPR RI

FOTO: MUNCHEN/VEL

BGN Jadi Instansi Terkaya 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) diusulkan memperoleh anggaran sebesar Rp217,86 triliun untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun 2026. Dinilai jumbo, DPR mewanti-wanti agar penyerapan anggaran harus tepat sasaran sekaligus akuntabel.

Pada akhir mei lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dari 98 K/L di Indonesia, BGN menjadi salah satu instansi yang akan memperoleh anggaran terbesar tahun 2026. Kebijakan ini diusulkan demi menyukseskan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai perbandingan, anggaran MBG pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp121 triliun. Dimulai dari pagu awal Rp71 triliun, lalu ditambahkan sebesar Rp100 triliun. Artinya, ada kenaikan anggaran MBG sebesar Rp96,86 triliun pada 2026. Penambahan anggaran ini disebabkan BGN akan melayani lebih dari 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30 ribu unit satuan layanan pemenuhan gizi yang tersebar di Indonesia.

Turut mengaminkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan program MBG berpotensi mendorong sektor ekonomi baru di pedesaan, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditargetkan

pemerintah dapat dicapai. Selain itu, program ini akan difokuskan di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun juga tersebar di seluruh Indonesia.

Menanggapi kebijakan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan agar penggunaan anggaran ini dilakukan secara tepat sasaran dan transparan, mengingat program utama yang dijalankan BGN, yakni MBG menjadi prioritas pemerintah. Dengan pagu anggaran sebesar itu, ia mendorong BGN menerapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat. Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.

"Anggaran BGN harus tepat

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi.



FOTO: GERALDI/VEL

sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan," katanya. Ia mengusulkan agar parlemen membentuk tim pengawasan khusus untuk program tersebut. "Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab," tegas Nurhadi.

Ia juga meminta BGN melakukan evaluasi internal terhadap para petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya ada sejumlah petugas yang kurang kooperatif dan cenderung mempersulit proses partisipasi publik.

"Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini," tutur politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Perlu diketahui, dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, terjadi perubahan signifikan dalam daftar K/L dengan anggaran terbesar, sehingga BGN menduduki peringkat pertama, menggeser Kementerian Pertahanan yang sebelumnya menempati posisi teratas pada 2025. Besarnya alokasi anggaran ini harus diiringi dengan pengawasan ketat yang menjadi prasyarat guna memastikan manfaat anggaran benar-benar tepat sasaran.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak menabrak konstitusi. Pasalnya, ia menilai pemerintah terlihat dilema dalam menentukan alokasi anggaran di tengah berbagai kebutuhan nasional lainnya, seperti



Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati.

“

Banyak daerah dengan keterbatasan fiskal kesulitan memenuhi standar pendidikan yang layak, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

Esti Wijayati
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pertahanan. Sebab itu, dirinya menegaskan MBG lebih terkait pada program kesehatan, dan bukan pendidikan. Ia tidak ingin anggaran pendidikan dipangkas demi menyukseskan MBG semata.

"Di tengah penambahan (anggaran) MBG, pemerintah harus

juga menyelesaikan ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara pusat dan daerah juga menjadi permasalahan. Banyak daerah dengan keterbatasan fiskal kesulitan memenuhi standar pendidikan yang layak, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," tutur Esti.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Sebab, tanpa sumber daya manusia yang cerdas dan terampil, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin tertinggal.

Oleh karena itu, Esti ingin pemerintah berkomitmen memastikan pemanfaatan anggaran secara efektif. Ia pun menegaskan pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam proses pengalokasian anggaran. Selain memastikan anggaran pendidikan benar-benar mencapai 20 persen dari APBN, dirinya menilai perlu ada evaluasi berkala mengenai efektivitas penggunaannya.

um/
mh

KUHAP Baru: Dari Suara Rakyat ke Ruang Rapat

Di tengah derasnya arus tuntutan reformasi hukum, Komisi III DPR RI membuka lebar pintu partisipasi publik dalam penyusunan RUU KUHAP—sebuah momentum krusial untuk membangun hukum acara pidana yang lebih adil, manusiawi, dan relevan dengan zaman.

“KUHAP yang sekarang ini warisan kolonial. Sudah waktunya kita tinggalkan dan buat sistem yang berpihak pada rakyat,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Juni lalu.

Semangat membenahi relasi negara dan warga negara menjadi benang merah. Habiburokhman kembali menekankan, “State kita terlalu powerful, warga terlalu powerless. Itu yang harus dibalik.

Advokat harus kuat, rakyat harus didampingi,” ucapnya.

RUU KUHAP baru tidak hanya berbicara tentang prosedur, tapi tentang paradigma. Ia adalah penanda zaman: dari sistem kolonial menuju hukum progresif berbasis keadilan sosial. “Kita ingin aturan yang lebih manusiawi, lebih progresif, dan jauh lebih baik dari yang ada saat ini. Karena KUHAP yang sekarang sudah tidak memadai,” pandang politisi Partai Gerindra ini.

Partisipasi publik yang intensif dalam penyusunan RUU ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah pembuktian bahwa hukum bukan milik segelintir elit, tapi suara bersama yang dirajut dari ruang sidang, kampus, jalanan, hingga pelosok negeri.

Komisi III DPR RI terus menunjukkan komitmennya dalam merumuskan RUU KUHAP yang lebih modern dan akuntabel. Hingga pertengahan Juli 2025, sebanyak 150 pasal telah berhasil disinkronkan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR bersama



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi advokat, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).



Anggota Komisi III Bimantoro Wiyono.



Anggota Komisi III I Wayan Sudirta.

pemerintah. Habiburokhman, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan secara transparan dan terbuka untuk partisipasi publik, bahkan disiarkan langsung melalui kanal resmi DPR.

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang terus digelar bahkan di masa reses, DPR mengundang advokat, akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah hak-hak saksi, tersangka, dan korban. Anggota Komisi III I Wayan Sudirta, menyuarakan urgensi soal pembiayaan transportasi bagi saksi dari daerah terpencil. "Orang mau jadi saksi, tapi tidak ada ongkos. Kalau tidak hadir, malah kena sanksi. Ini tidak adil," nilainya, Mei silam.

Masukan dari kelompok rentan juga mendapat panggung. Komisi Nasional Disabilitas, bersama mahasiswa Undip, mengingatkan agar KUHAP baru mengakomodasi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nasir Djamil mengapresiasi hal itu, sembari menegaskan, "Kita harus kawal mereka dari awal sampai akhir. Mereka punya hak yang sama untuk diperlakukan manusiawi," katanya.

Para advokat pun tidak ketinggalan ikut bersuara. Bimantoro

Wiyono menekankan bahwa peran advokat harus lebih kuat sejak awal proses hukum. Penguatan ini untuk hak warga negara benar-benar terlindungi," ujarnya. Bahkan, pasal yang melarang advokat bicara di depan publik telah dihapus dari draf.

Lebih dalam, Martin D. Tumbelaka menyoroti praktik kekerasan dalam pemeriksaan sebagai bentuk kegagalan perlindungan hukum. Ia membagikan kisah nyata dari dapilnya: seorang warga sehat ditahan karena tuduhan pemalsuan, namun meninggal dalam tahanan. "Ini menandakan pentingnya dalam KUHAP nanti penguatan soal kekerasan dalam pemeriksaan, baik tersangka saat diperiksa maupun saat ditahan," tegasnya.

Sementara itu, aspirasi mahasiswa dari UI, Lampung, dan berbagai kampus lainnya menjadi nyala idealisme di ruang parlemen. Bob Hasan menyambutnya hangat dalam RDPU, Juni lalu. "Generasi kalian butuh KUHAP yang adil, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan."

Dalam keterangannya pada Juli lalu, Habiburokhman juga menjelaskan sejumlah isu krusial yang kerap disalahpahami publik. Di antaranya, masa penangkapan tetap 1x24 jam seperti KUHAP lama, hak memilih kuasa hukum dijamin penuh, hingga syarat penahanan yang kini



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

lebih terukur. DPR juga memastikan bahwa tidak ada tambahan kewenangan absolut bagi Polri, serta menegaskan bahwa pengaturan soal penyadapan tidak diatur dalam RUU KUHAP, melainkan akan dibahas dalam undang-undang tersendiri.

Proses perumusan RUU KUHAP terus berlanjut dan setelah seluruh pasal disusun dan disinkronkan, hasilnya akan diserahkan kembali ke Panitia Kerja untuk dikaji ulang sebelum dibawa ke forum Komisi III. "Kami bekerja secermat mungkin agar publik tidak hanya tahu apa yang diatur, tapi juga memahami semangat di balik pasal-pasal itu," tegas Habiburokhman. **gal/mh**



Rapat evaluasi internal Timwas Haji DPR RI, yang di pimpin Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung Nusantara, DPR RI, Senaya, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Foto : Tari/Andri



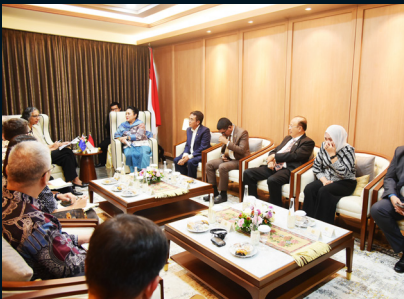
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, saat menghadiri acara Forum Seminar Tematik Bakohumas bertajuk Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik pada Kamis (10/7/2025).

Foto: Prima/Andri





Konferensi pers Komisi III terkait KUHP, yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) berjalan secara transparan dan terbuka. Foto: Dep/Andri



Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menerima kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Australia, Gita Kamath di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Foto: Oji/Andri





Komisi V DPR RI bersama 7 (tujuh) kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, menandatangani penetapan pagu indikatif tahun anggaran 2026 dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, agenda ini menjadi langkah awal yang krusial dalam penyusunan RAPBN 2026. Foto : Oji/Andri



Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso saat memimpin audiensi dengan Perwakilan Persatuan Mahasiswa Palestina di Indonesia yang dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Ia menyatakan, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan kolonialisme. Foto : Runi/Andri



Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan Adang Daradjatun sebagai Wakil Ketua MKD DPR RI, menggantikan rekan se-fraksinya Habib Aboe Bakar Alhabsyi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Foto : Mario/Andri



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung dalam diskusi dengan pakar mengenai RUU Hukum Adat di Ruang Rapat Baleg, Gedung Parlemen, Jumat (11/7/2025). Foto: Farhan/Andri



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar secara resmi membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya ASN, baik CPNS dan PPPK, aktif membangun mentalitas kerja yang tangguh. Foto: Gerald/Andri



Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi launching buku Pancawarsa Memperkuat Titian Dunia Akademik dan Politik di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2025). Peluncuran buku ini dihadiri oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Natakusumah, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, dan jajaran pejabat Badan Keahlian Setjen DPR RI. Foto: Arief/Andri



Irsan Sosiawan Mengabdikan Untuk Rakyat

Di tengah riuhnya kota Jakarta pada 10 September 1970, seketika tangis bayi memecah keheningan di Rumah Sakit St. Carolus. Seorang ibu bersahaja mengucap tahmid tiada henti setelah melakukan persalinan anak bungsunya. Kedua orangtuanya kemudian memberi nama bayi laki-laki mungil menggemaskan ini dengan nama Irsan Sosiawan Gading.

Irsan adalah bungsu dari lima bersaudara. Nama "Sosiawan" diberikan sang ayah H.M. Jusuf Gading saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial. Ini penanda bahwa hidupnya akan selalu beririsan dengan kebaikan dan pengabdian pada masyarakat. Diakhiri dengan nama Gading sebagai nama keluarga besar yang akan terus dibawa.

Inilah Irsan Sosiawan Gading, politisi dari Fraksi Partai Nasdem DPR RI. "Pas saya lahir tahun 70, bapak saya sedang menjabat sebagai Dirjen Badan Sosial. Maka, nama saya ada Sosiawan-nya," kenang Irsan. Sementara ibundanya bernama Rohana Paloh, wanita yang sangat perhatian pada relasi sosial di lingkungan dekat rumahnya. Ia merupakan kakak kandung dari Surya



FOTO: MENTARI/VEL

Paloh. Rohana adalah sosok berhati mulia yang mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang yang tidak mendapatkan akses ekonomi dan tak terurus keluarganya.

Masa Kecil

Masa kecil Irsan dihabiskan di ibu kota, tepatnya di kawasan Matraman, tempat keluarganya tinggal. Irsan kecil selalu menyaksikan bagaimana ibundanya penuh kasih membagikan santunan kepada para lansia dan anak yatim. "Setiap pulang sekolah, saya selalu mampir ke yayasan, melihat ibu saya membagikan santunan (rantang berisi makanan) yang dibagikan kepada para lansia dan anak yatim," kenang Irsan.

Bicara masa kecil, Irsan menuturkan, ia selalu dibatasi aturan ketat orangtuanya yang mendidik dengan disiplin tinggi. Setelah pulang sekolah, Irsan tidak bisa langsung bermain. Ia harus segera ganti baju, tidur siang, dan melanjutkan dengan kegiatan les. Namun, semua aturan ketat itu tidak merenggut kebahagiaan masa kecilnya. Setelah semua kewajibannya selesai, Irsan bebas bermain bersama teman-teman kecilnya.

"Kalau enggak tidur, kadang dicubit. Kalau enggak, saya dikunci di dalam kamar sampai nangis," ungkap Irsan, mengenang masa kecil. Meski begitu, masa kecilnya dipenuhi kenangan manis dengan berbagai permainan tradisional. Bersama teman-temannya, Irsan kecil suka sekali bermain. Permainan favoritnya adalah galasin, petak umpet, bentengan, adu layangan, dan bahkan adu burung dara. Irsan kecil juga sangat suka main bola, pingpong, dan catur.

Bila telat pulang ke rumah setelah bermain, ayahnya tak segan-segan memberikan hukuman. Suatu hari Irsan kecil pernah dikurung oleh ayahnya di kamar mandi, karena terlalu asyik main sepak bola saat hujan, tanpa mengenal waktu.



Irsan Sosiawan kecil.

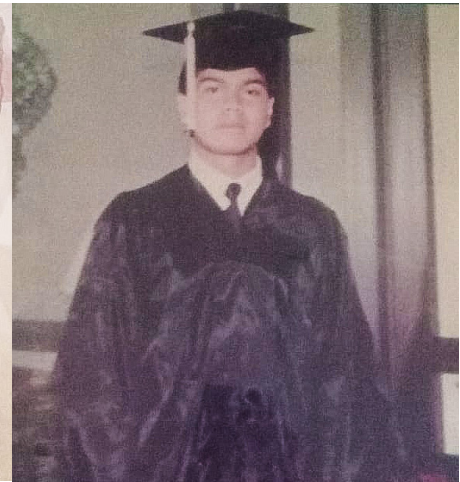
Padahal, ketika itu waktu magrib telah tiba. Ia pun telat mengaji. Aturan disiplin waktu, memang, jadi bagian tak terpisahkan dari hidup seorang Irsan.

Memasuki usia 9 tahun, Irsan mulai menggemari dunia golf. Ia seperti menemukan bakatnya di olahraga ini. Bahkan, pada usia 9 tahun itu, ia sudah meraih berbagai penghargaan dari turnamen golf untuk kelompok usia. "Saya ikut pertandingan junior open saat umur saya hampir 10 tahun. Saya dapat runner-up di tahun 1982," kenangnya. Setiap kali pulang sekolah, ia langsung ke lapangan golf.

Yang membanggakan adalah ketika ia meraih piala mantan Wakil Presiden Adam Malik. Bagi Irsan, olahraga ini bukan hanya sekadar hobi, melainkan sebuah pelajaran tentang kesabaran, fokus, dan ketenangan. Namun, di tengah kegemilangannya sebagai atlet golf, sang ayah mengambil keputusan mengejutkan. Irsan diminta kuliah ke Amerika, yang berarti ia harus meninggalkan dunia golf, dunia yang sudah dicintainya sejak kecil.

Kuliah di Amerika

Sang ayah mengkhawatirkan Irsan yang tak lagi memperhatikan pendidikan, karena sehari-hari hanya sibuk di lapangan golf dan ikut



Saat Wisuda Sarjana.

turnamen. "Bapak saya sudah lihat arah saya yang enggak mau sekolah," ungkap Irsan. Dengan alasan ini, ayahnya memutuskan mengirimnya kuliah ke Amerika Serikat, mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu berada di negeri Paman Sam itu.

Awalnya, Irsan menolak kuliah ke luar negeri, karena sudah merasa nyaman di Jakarta, dekat dengan keluarga dan teman-temannya. Namun, ayahnya tetap membujuknya ke Amerika, "Kamu coba aja ke sana. Kamu cobain aja tiga bulan dulu, ambil bahasa Inggris aja," katanya, menirukan ucapan sang ayah. Ia akhirnya pergi ke Los Angeles, hanya membawa satu koper, dengan niat sekadar menghadiri wisuda kakaknya.

Di AS, ia harus belajar hidup mandiri, menjadi mahasiswa dan pekerja. Irsan pernah bekerja serabutan sebagai "tukang checker" di sebuah bank federal. Seiring berjalannya waktu, Irsan memahami keputusan ayahnya dahulu. Ternyata untuk memberikan peluang dalam melihat dunia yang lebih luas. Bagi Irsan pengalaman belajar dan bekerja di Amerika menjadi bagian perjalanan hidup yang mendewasakannya. Banyak nilai-nilai ketekunan dan kegigihan yang terinternalisasi dalam diri Irsan hingga hari ini.

Saat di Amerika, ia kuliah

Bachelor of Business Administration di *Los Angeles City College*, tahun 1989. Lalu, melanjutkan *Master of Business Administration* di *Northrop University*, Amerika Serikat, tahun 1992. Suka duka hidup di Amerika sudah ia rasakan betul. Irsan juga aktif di PERMIAS, organisasi pelajar Indonesia di Amerika. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai ketuanya. Ia mengatur berbagai kegiatan mahasiswa Indonesia, seperti pertandingan golf, bowling, dan acara malam budaya. Ia akhirnya menemukan harmoni dalam menjalani kewajiban belajar sambil menekuni kembali olahraga kegemarannya. Hal ini kemudian membuat Irsan merasa nyaman dan berlama-lama tinggal di Amerika.

Pulang ke Indonesia

Akhir 1993, setelah menyelesaikan studinya di Amerika, Irsan ditelepon ibunya untuk pulang ke Tanah Air. Ia menirukan tutur ibunya yang bicara di pesawat telepon. "Bapak, tuh, udah tua, nanti kamu nyesel. Kok, kamu masih di sana. Bapak di sini kangen, lama enggak ketemu." Kalimat itu menyentuh hati Irsan. Ia sadar, terlalu larut mengejar pengalaman hidup di negeri orang dan harus segera kembali ke Tanah Air. "Akhirnya saya putuskan, saya balik," ceritanya, lebih lanjut.

Akhirnya, Irsan bisa berkumpul dengan keluarga tercintanya di Jakarta. Namun, ia sempat merasakan kebimbangan dalam pencarian jati diri. "Saya pernah bingung dan sempat menjadi 'pengacara' alias pengangguran banyak acara. Apalagi, posisinya memang baru pindah, enggak betah kalau tidak bekerja dan bergerak," kelakar Irsan, mengenang dua minggu pertamanya di rumah.

Pada awal 1994, seorang kawan meminta bantuan untuk mengurus mobil reli di Australia. Dari sana, Irsan mulai merintis kariernya, terlibat dalam dunia balap mobil. Irsan mulai membangun relasi dan belajar



Aksi giat dapil Irsan Sosiawan saat berada di tengah masyarakat di dapilnya.

banyak soal bisnis ini. Irsan akhirnya dipercaya oleh Tomy Soeharto bergabung sebagai *General Sales Agent* di Sempati Air (1996 -1998).

Kerberhasilan Irsan pada karier sebelumnya di anak perusahaan Media Group membawa ia terus meniti tangga karir profesional. Ia diberi kepercayaan Surya Paloh (pamannya) bergabung di Media Group. Ketangkasan dan kebijaksanaannya dalam memimpin, membawa Irsan menduduki beberapa posisi strategis. Misalnya, ia dipercaya menjabat direktur di PT. Mifa Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari. Dalam rentang tahun yang sama ia bahkan dipercaya memegang kendali sebagai direktur di beberapa perusahaan.

Kegigihannya selama lebih dari satu dekade, akhirnya membuat Irsan diamanahi menjabat sebagai direktur utama di PT. Media Djaya Bersama. Irsan terlibat dalam merintis dan membesarkan perusahaan yang kini mempekerjakan kurang lebih 4.200 karyawan yang juga memberikan sumbangsih besar di bidang sosial dan pendidikan di Aceh.

Panggung Politik

Setelah malang melintang mencapai puncak karirnya di beberapa perusahaan, Irsan mulai tertarik dengan dunia politik. Pergaulannya yang luas di dunia usaha, apalagi pamannya seorang ketua umum partai, mengantarnya ke panggung politik. Ia mulai tergugah untuk terjun menjadi politisi. Bukan kepentingan politik jangka pendek yang ingin dipilih, tapi Irsan ingin berbagi manfaat hidup dari keputusannya berpolitik. Ia ingin ikut andil merumuskan berbagai kebijakan publik yang populis di dapur kebijakan seperti DPR RI.

Setelah puluhan tahun bergelut menjadi pengusaha, Irsan merasa terpanggil ikut berpolitik, menebar manfaat dan menyejahterakan rakyat. Dorongan dari Surya Paloh membuka jalan menuju panggung politik. Irsan menyadari bahwa politik bukanlah dunia yang mudah, jauh berbeda dengan menjalankan sebuah perusahaan. Namun, ia tidak gentar. Ia ingin melaksanakan cita-cita mulia kedua orangtuanya untuk mewakafkan diri bagi masyarakat dan bermanfaat lebih luas dalam menjalani kehidupan.

Ia sadar, sebagai seorang politisi,



tugasnya bukan hanya duduk di ruang rapat, tetapi juga turun ke lapangan untuk mendengar keluhan kesah masyarakat. Pada pemilu 2024, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil Aceh II. Irsan pun akhirnya resmi dilantik menjadi anggota DPR RI dan duduk di Komisi XII yang membidangi energi. Kini, di pundaknya ada amanah yang harus dijaga, suara rakyat Aceh.

Tidak tanggung-tanggung setiap kali reses, Irsan selalu turun ke daerah pemilihannya meski harus menempuh jarak yang jauh dan memakan waktu hingga lebih dari 7 jam perjalanan darat. Ia tidak segan memberikan berbagai dampak langsung pada masyarakat dengan merogoh kantong pribadinya, seperti pemberian beasiswa *boarding school* tingkat menengah pada 30 anak muda Aceh, hingga berbagai bantuan sosial lainnya.

Bahagia Bersama Keluarga

Kesibukkannya menjadi wakil rakyat telah menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Namun, saat di rumah, ia tetaplah seorang suami dan ayah yang bersahaja. Di rumahnya ada Dewi



Bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Candrawati istri tercinta. Irsan dikarunia tiga anak, masing-masing Muhammad Frasha Gading, Muhammad Rafha Hassya, dan Arshan Satyawati Gading. Bila ada waktu senggang, ia kerap mengajak keluarganya berwisata. Kebun binatang atau ke tempat penangkaran sapi jadi destinasi edukatif yang dikunjungi bersama keluarga.

Sementara bicara hobi, Irsan tetap menyukai golf hingga kini. Irsan juga tidak jarang melibatkan kedua anaknya yang sudah menginjak usia dewasa untuk turut serta dalam bermain golf. Waktu bersama keluarga adalah yang paling penting bagi Irsan. Soal makanan, ia menyukai ayam, nasi



Bersama Keluarga tercinta.

padang, dan kuliner khas Aceh.

Meski cukup giat sebagai seorang politisi, penikmat musik jazz ini tak mengarahkan anak-anaknya menjadi politisi seperti dirinya. Ia bebaskan anak-anaknya mengambil jalan hidup masing-masing. Irsan percaya setiap anak memiliki kelebihan dan keahliannya masing-masing. Begitulah perjalanan hidup singkat Irsan Sosiawan.

Jiwa sosial yang diwariskan ibundanya dan berpengetahuan yang ditekankan ayahnya, berpadu dalam kepribadian Irsan Sosiawan Gading. Berpolitik baginya adalah menebar manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama konstituen di dapilnya.

 rnm/mh

Mengawasi Pembangunan Kodam Baru

Pembangunan lima markas Komando Daerah Militer (Kodam) direncanakan akan dibangun. Satu di antaranya dibangun di Provinsi Lampung. Pembangunan lima Kodam baru pada 2025 ini masih harus melihat kemampuan anggaran dalam APBN. Bila anggaran belum mencukupi, pembangunannya bisa dicicil.

Delegasi Komisi I DPR RI berkunjung ke Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk membincang kembali rencana pembangunan Kodam Lampung dan Bengkulu. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan bahwa pembangunan Kodam merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang pertahanan. Pembangunan ini telah digariskan Presiden RI dalam rencana pembangunan pertahanan negara yang masif dan terintegrasi.

"Ini sesuai dengan program pembangunan pertahanan yang dimulai oleh presiden kita, untuk memastikan target-target pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik nasional, dan penguatan kekuatan pertahanan negara. Maka itu dibutuhkan pembentukan Kodam-Kodam di seluruh Indonesia," ujar Dave, Jumat (4/7/2025) silam di Lampung.

Untuk tahap awal, pemerintah merencanakan membangun lima Kodam baru tahun ini dan salah satunya akan dibangun di Lampung. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan ketersediaan anggaran dalam APBN, pembangunan lima Kodam tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita akan cicil. Targetnya, ke



Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, saat bertukar cinderamata usai pertemuan kunjungan kerja spesifik ke Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung.

depan setiap provinsi memiliki satu Kodam. Ini adalah upaya membangun sistem pertahanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga menyoroti proses pembangunan Kodam, terutama

terkait pendanaan dan penyediaan lahan. Kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam pertemuan tersebut dinilai ikut berkomitmen mendukung program strategis ini.

"Kendala-kendala seperti anggaran dan soal lahan pasti ada, tapi bisa diselesaikan. Pemerintah



FOTO: PRIMANVEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Markas Korem 031/Wira Bima, Pekanbaru, Riau, Kamis (3/7/2025).



Pemerintah merencanakan membangun lima Kodam baru tahun ini dan salah satunya akan dibangun di Lampung.

Dave Akbarshah Fikarno Laksono
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

provinsi menunjukkan keseriusannya dengan komitmen untuk hibah lahan. Dukungan dari kementerian/ lembaga terkait juga sangat dibutuhkan untuk memastikan percepatan pembangunan Kodam di sini," jelas Dave.

Lebih lanjut, Komisi I menekankan pentingnya pembangunan Kodam yang tidak hanya berorientasi pada aspek militer, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat

luas. Pembangunan ini harus memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Kehadiran personel TNI dalam struktur Kodam nantinya harus memiliki fungsi yang nyata dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat," tutup Dave.

Peningkatan Korem Jadi Kodam

Di Pekanbaru, Riau, wacana menaikkan level Komando Resor Militer (Korem) menjadi Kodam jadi perbincangan serius Komisi I DPR. Korem 031/Wira Bima rencananya akan dimekarkan menjadi Kodam XIX. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan hal ini di Pekanbaru, Riau, Kamis (3/7/2025) lalu.

"Ini langkah penting. Kami ingin memastikan bahwa pemekaran ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar siap dilaksanakan. Tadi, Pak Danrem menyampaikan paparan yang sangat rinci, mulai dari kondisi existing hingga analisa kelebihan dan kekurangan seluruh fasilitas,

sarana-prasarana, personel, bahkan aspek material maupun non-material," jelas Sukamta kepada Parlemenaria.

Politisi Fraksi PKS tersebut menambahkan, hasil kunjungan ini menjadi masukan strategis bagi Komisi I DPR RI. "Minggu depan kita memasuki fase penting, yaitu pembahasan anggaran bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala-Kepala Staf. Apa yang kami lihat dan dengar di lapangan hari ini akan sangat menentukan arah kebijakan kami di Senayan," tambahnya.

Dukungan terhadap pemekaran Kodam XIX dinilai penting untuk memperkuat pertahanan di wilayah strategis Sumatera yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional. "Kami ingin memastikan bahwa Riau dan wilayah sekitarnya memiliki komando militer yang lebih responsif dan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan di era global saat ini," pungkasnya.

gys.pdt/mh

Menertibkan Kembali Tanah HGU

Tanah-tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGU) banyak yang tidak akurat ukuran luasnya. Hal itu berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan. Penertiban administrasi tanah HGU perlu kembali dilakukan.

Di Provinsi Lampung, pengawasan terhadap tanah-tanah HGU dibahas Komisi II DPR RI bersama Pemerintah

penerbitan HGU perlu ditertibkan, karena banyak perbedaan ukuran luasan tanah dalam sertifikat HGU. "Kita (Komisi II DPR) akan menertibkan penerbitan HGU, yaitu

di Kota Bandar Lampung, Lampung, Rabu (2/7/2025) lalu.

Ia melanjutkan bahwa beberapa waktu lalu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, pihaknya akan menginventarisir semua HGU yang ada di Indonesia dan menertibkan HGU tersebut dengan cara dikembalikan ke negara dan melakukan pendataan HGU ulang. "Jadi, nanti akan tertib, akan terlihat siapa saja yang akan mendaftar dan menggunakan HGU tersebut, sehingga dapat terlihat jelas berapa pemasukan PNBP dari sektor pertanahan itu," jelas politisi F-PKB ini.

Komisi II, lanjutnya, meminta agar proses penertiban HGU khususnya di Provinsi Lampung bisa cepat terealisasi dengan baik dengan cara saling koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. "Perlu ada koordinasi yang baik dari Kementerian



Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha (tengah) dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II, di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (2/7/2025).

Provinsi Lampung. Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menyoroti percepatan realisasi PNBP pada sektor pertanahan ini. Menurutnya,

HGU yang tidak digunakan dan HGU yang luasannya berbeda-beda serta menurut sumber yang berbeda juga, ini harus ditertibkan segera," katanya

ATR/BPN dengan pemerintah daerah, karena Pemda yang punya datanya, dan perlu juga dipanggil pemilik HGU tersebut, agar cepat

teralisasi,” tutupnya.

Sementara Padang, Sumatera Barat, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, menegaskan pentingnya keterbukaan dan kepastian pelayanan pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menyerukan perlu tarif dan waktu pelayanan yang jelas dalam proses sertifikasi lahan maupun peralihan hak atas tanah.

“Tentu yang pertama, catatan penting adalah tarif yang harus sangat amat jelas pada saat pelayanan pertanahan. Masyarakat yang ingin mendaftarkan lahannya untuk disertifikasi atau melakukan pengalihan nama karena jual beli, harus tahu dengan pasti berapa biayanya dan berapa lama prosesnya. Jangan sampai sudah lengkap syaratnya tapi tidak ada kejelasan waktu, ada yang tiga bulan, ada yang setahun. Ini yang ditunggu masyarakat,” ujar Heryawan di Padang, Sumatera Barat, Kamis (3/7/2025) lalu.



Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, saat melakukan pertemuan dengan Kanwil Kementerian ATR/BPN Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, Kamis (3/7/2025).

FOTO: KIKI/VEL



Ketidakjelasan waktu penyelesaian dan biaya dalam pelayanan pertanahan seringkali merugikan masyarakat yang sudah mengikuti prosedur dengan benar.

Ahmad Heryawan
Anggota Komisi II DPR RI

Menurut Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan, ketidakjelasan waktu penyelesaian dan biaya dalam pelayanan pertanahan seringkali merugikan masyarakat yang sudah mengikuti prosedur dengan benar. Ia menegaskan bahwa negara melalui BPN seharusnya hadir membela dan melindungi hak masyarakat, khususnya dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Selain itu, Aher juga menyoroti persoalan tumpang tindih lahan antara SHM yang sudah dimiliki masyarakat dengan klaim kawasan hutan oleh negara. Ia menekankan penting penyelesaian yang adil dan tidak merugikan warga yang sudah resmi memiliki sertifikat.

“Ketika sudah ada SHM, itu adalah bukti kepemilikan paling tinggi. Tapi, kemudian ada proyek negara atau pelaksanaan undang-undang, misalnya undang-undang kehutanan,

dan tiba-tiba lahan masyarakat dinyatakan sebagai kawasan hutan, maka ini sangat merugikan. Padahal, prosesnya benar, dilayani oleh negara lewat BPN. Ini harus ada jalan keluar,” tegasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menekankan, penataan kehutanan sebagai upaya pelestarian lingkungan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat yang telah memiliki sertifikat resmi. Ia mendorong adanya solusi yang adil dan dijamin oleh negara.

“BPN harus jadi pembela rakyat dalam situasi seperti ini. Ketika SHM yang dikeluarkan negara harus hilang begitu saja hanya karena penataan kehutanan, maka itu harus dikompromikan. Hak rakyat harus dilindungi. Kalau pun harus kehilangan hak, harus ada penggantinya,” kilahnya. cas,qq/mh

RUU KUHAP Terus Dimatangkan

Komisi III DPR RI terus mematangkan pembahasan RUU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan menyerap banyak perspektif dan aspirasi dari masyarakat. Banyak rumusan baru dalam KUHP kali ini, seperti peran penyidik BNN dan perlindungan bagi whistleblower.

Komisi III DPR RI menggelar pertemuan dengan Polda Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk membincang rumusan RUU KUHP. Dalam pertemuan

yang berlangsung di Mapolda DIY, sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari peran penyidik BNN hingga perlindungan bagi whistleblower dalam sebuah kasus pidana.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengungkapkan, pertemuan ini

memperkaya substansi RUU KUHP yang sedang dibahas di parlemen. "Alhamdulillah, pertemuan di Mapolda Yogyakarta ini memberikan sejumlah masukan penting, terutama dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) mengenai urgensi memasukkan penyidik BNN sebagai bagian dari penyidik tertentu dalam

“

Kejaksaan turut menyuarakan pentingnya memperkuat prinsip dominus litis, yaitu kewenangan penuh jaksa dalam penuntutan perkara.

Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR RI



FOTO: SINGGIH/VEL

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda DIY, Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (2/7/2025).

hukum acara pidana,” ungkap Nasir, usai pertemuan, Rabu (2/7/2025) lalu.

Selain itu, kejaksaan turut menyuarakan pentingnya memperkuat prinsip dominus litis, yaitu kewenangan penuh jaksa dalam penuntutan perkara. Sejumlah isu lainnya juga menjadi perhatian, seperti mekanisme penyitaan, kedudukan justice collaborator, saksi pelaku atau saksi mahkota, hingga pengaturan tentang whistleblower.

“Bahkan, nanti akan diatur soal whistleblower dan bolak-balik perkara antara penyidik dengan penuntut. Hal-hal seperti ini akan sangat berguna untuk mematangkan revisi KUHAP yang tengah disusun oleh DPR,” jelas Nasir. Masukan juga disampaikan oleh kpolisian, kejaksaan, pengadilan, serta BNN Provinsi DIY. Komisi III menilai dialog dengan para pemangku kepentingan di daerah penting untuk memastikan pembaruan KUHAP mampu menjawab tantangan hukum modern serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

RUU KUHAP merupakan upaya strategis DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah berlaku selama lebih dari empat dekade. Pembaruan ini diharapkan menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, responsif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara di Bandung, Jawa Barat, Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menegaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP diarahkan untuk memperkuat hak-hak warga negara, baik sebagai tersangka maupun sebagai korban dalam proses penegakan hukum.

“Dalam sistem hukum kita, posisi tersangka itu sangat lemah ketika berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum. Di sisi lain, korban juga sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai atas kerugian yang



Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Bandung, Kamis (3/7/2025).



Pembahasan RUU KUHAP diarahkan untuk memperkuat hak- hak warga negara

Benny Utama
Anggota Komisi III DPR RI

dialaminya. KUHAP yang baru harus hadir mengatasi ketimpangan ini,” ujar Benny usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Bandung, Kamis (3/7/2025) lalu.

Menurutnya, KUHAP yang selama ini berlaku belum cukup menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ia menyebut perlu penguatan pendampingan

hukum bagi tersangka, termasuk keterlibatan aktif pengacara sejak proses pemeriksaan awal. “Pengacara tidak hanya boleh hadir, tapi juga harus bisa aktif mendampingi kliennya sejak awal. Itu penting agar posisi tersangka tidak sepenuhnya dalam tekanan negara,” jelas legislator dari Dapil Sumatera Barat II itu.

Sementara untuk korban, Benny menekankan pentingnya menghadirkan keadilan yang utuh, terutama dalam skema restorative justice (RJ). Ia menyebut bahwa ke depan, KUHAP harus menjadi satu-satunya rujukan dalam penerapan RJ yang adil dan seragam. “Selama ini pelaksanaan RJ tidak seragam. Ada peraturan Kapolri, ada Perma, ada Peraturan Jaksa Agung. Kita ingin KUHAP yang baru menyatukan semua itu agar tidak ada lagi tafsir yang berbeda-beda,” tegasnya.

— skr,aha/mh



Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/7/2025).

Mengapresiasi Terobosan Budidaya Ikan

Ada terobosan baru dalam budidaya ikan air tawar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melakukan inovasi sekaligus memberi pelajaran bagaimana membudidayakan ikan air tawar yang produktif. Kelompok tani diajak melihat dari dekat budidaya ikan sekaligus membagikan bibit ikan untuk dibudidayakan.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi terobosan budidaya ikan air tawar yang dilakukan Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP) di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Melalui Smart Fisheries Village (SFV), yaitu konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi

informasi dan manajemen tepat guna, KKP menciptakan sentra-sentra budidaya ikan air tawar di pedesaan. Setidaknya sudah ada 22 lokasi SFV, salah satunya ada di Sukamandi, Subang.

Dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati, delegasi Komisi IV melihat dari dekat budidaya ikan air tawar. Ada banyak jenis ikan air tawar yang dibudidayakan di sini, seperti lele, patin, mujair, sampai ikan hias. Di Sukamandi ini, ada penguatan peran teaching factory sebagai pusat inovasi dan inkubasi usaha perikanan bagi generasi muda.

"Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KKP yang telah melakukan terobosan membuat percontohan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi," nilai Titiek, di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/7/2025) lalu. Ini merupakan inovasi modern dalam membudidayakan ikan air tawar.

Hadir dalam tinjauan itu,

Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subang. Ada banyak kolam-kolam terpal tempat pembibitan ikan. Dari bibit sampai indukan tersaji di balai ini. Selepas meninjau kolam-kolam ikan, Titiek dan para anggota Komisi IV lainnya memberikan bibit ikan secara simbolis kepada para kelompok tani untuk dibudidayakan di desanya masing-masing.

Titiek juga menyerukan agar KKP meningkatkan skala kemitraan inti-plasma dengan menambah jumlah Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) mitra dan pembudidaya plasma di Subang. Ia juga mengapresiasi penerapan sistem digital oleh KKP dalam budidaya ikan ini. "Percepatan digitalisasi sistem budidaya melalui integrasi IoT, artificial intelligence, dan big data ditujukan untuk efisiensi produksi. IoT (Internet of Things) dalam perikanan adalah pemanfaatan teknologi sensor dan perangkat terhubung internet untuk memantau dan mengelola berbagai aspek budidaya ikan secara otomatis.

Vaksin PMK

Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang menjangkiti hewan ternak kembali merebak di beberapa daerah Indonesia. Kebutuhan vaksin akhirnya meningkat. Pemerintah daerah dan pusat terus berupaya mengatasi kekurangan vaksin dengan berbagai cara, termasuk pengadaan vaksin secara mandiri dan mempercepat distribusi vaksin yang sudah ada.

Kendala dan tantangan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan vaksin ini membutuhkan sikap tegas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Karantina Indonesia. Penanganan PMK membutuhkan kerja sama dan kesinergisan lintas sektoral, karena sifatnya lintas kewenangan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Keterbatasan anggaran untuk pengadaan vaksin PMK menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi tidak terpenuhinya jumlah vaksin yang diperlukan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel

Johan mengatakan, Komisi IV akan mendorong agar pemerintah untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan vaksin PMK ini.

"Kita sudah melihat fasilitas yang ada di Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma. Dan kita bangga karena kita di sini berhasil mandiri, dalam arti mampu memproduksi vaksin sendiri. Sekian puluh tahun yang lalu Indonesia telah bebas dari PMK, namun sayangnya tahun 2022 kita kembali menjadi negara yang masih ada PMK. Untuk itu, kita akan berupaya mendorong anggarannya," tutur Daniel di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/7/2025) lalu.

Ia memaparkan, dari 11 juta sapi yang ada di Indonesia, sebanyak 7 juta ekor sapi perlu divaksin. Dan jumlah 7 juta ekor sapi itu membutuhkan 14 juta vaksin. Sementara tahun ini pemerintah baru menganggarkan untuk 4 juta vaksin. "Sehingga kita kekurangan 10 juta vaksin. Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena ini menjadi program yang urgen," tandas Politisi Fraksi PKB ini.  mh,dep/mh



Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (4/7/2025).

Bandara Soetta Perlu Diperluas

Beberapa tahun terakhir lalu lintas penerbangan di Bandar Soekarno-Hatta kian padat. Angka penumpang pun kian menunjukkan grafik meningkat. Diproyeksikan, lima tahun ke depan jumlah penumpang di Bandara Soetta meningkat 10 persen.

Melihat fakta ini, delegasi Komisi V DPR RI berkunjung ke Bandara Soetta untuk melihat dari dekat kondisi bandara dan kepadatan lalu lintas penerbangan yang ada. Adalah Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, yang mengingatkan semua ini. Ia menyerukan agar otoritas bandara dan pemerintah

mengantisipasi lonjakan penumpang di masa depan.

Perluasan fasilitas bandara dan pemerataan lalu lintas penerbangan antarbandara di Pulau Jawa pun jadi keniscayaan untuk segera dilakukan. "Bandara ini, kan, jendela kita kepada dunia luar. Jadi, kalau tertib di bandara ini, baiklah nama bangsa ini. Tapi, kalau tidak tertib, itu juga menyangkut nama baik negara kita

di mata internasional," ujar Lasarus di Bandara Internasional Soetta, Cengkareng, Kota Tangerang, Banten, Jumat (11/7/2025) lalu.

Lasarus menyebut, saat ini jumlah pergerakan penumpang di bandara tersebut telah mencapai 94 juta per tahun, naik lebih dari tiga persen dibandingkan masa sebelum pandemi COVID-19. Dengan laju tersebut, ia mengingatkan bahwa kapasitas bandara bisa segera penuh dalam waktu dekat. "Sekarang sudah terasa crowded. Kami akan usulkan, kalau memungkinkan secara lahan, perluasan area terminal harus segera dipikirkan. Ini tanggung jawab Angkasa Pura dan juga Ditjen Udara," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia juga mengkritisi minimnya bandara internasional aktif di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jakarta idealnya memiliki dua atau tiga bandara internasional aktif, bukan hanya mengandalkan Soekarno Hatta. "Halim memang ada, tapi itu terbatas karena sifatnya militer. Praktis, kita hanya andalkan Soekarno Hatta," ujarnya.



Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat bertukar cinderamata usai pertemuan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat (11/7/2025).

Lebih lanjut, Lasarus menyarankan agar Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati dapat dioptimalkan untuk menampung arus penumpang dari kawasan timur Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. "Untuk Umrah saja misalnya, cukup lewat Kertajati. Apa yang kurang di sana nanti kita diskusikan dengan Ditjen Udara supaya segera diperbaiki," jelasnya.

Untuk jangka pendek, Lasarus meminta penataan ulang sirkulasi penumpang di bandara agar operasional lebih tertib. Ia juga menekankan pentingnya menjaga citra Indonesia di mata dunia melalui bandara yang dikelola dengan baik. "Bandara ini mencerminkan wajah bangsa. Jadi, wajib hukumnya untuk kita tata dengan baik. Saat ini masih cukup, tapi kalau kita terlambatantisipasi, ini akan jadi beban besar di kemudian hari," tutup Lasarus.

Pendangkalan di Pelabuhan Bengkulu

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty meminta Kementerian Perhubungan bersama Pelindo melakukan percepatan pengerukan pada pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Politisi PKS ini berharap dengan percepatan pengerukan tersebut, aktivitas pelayaran dan ekonomi bisa kembali normal.

"Komisi V DPR RI datang ke sini memastikan agar pekerjaan pembukaan pendangkalan ini bisa dipercepat oleh Kementerian Perhubungan dan Pelindo. Mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai target agar konektivitas ini bisa terbuka dan masyarakat bisa menjalankan aktivitas ekonominya dengan lancar," ujar Saadiah Bengkulu, Kamis (3/7/2025) silam.

Dalam kunjungan tersebut, Saadiah beserta rombongan Komisi V DPR meninjau langsung pelaksanaan pengerukan yang tengah



FOTO: EKI/VEL

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Bengkulu, Kamis (3/7/2025).

Banyak harapan yang digantungkan pada proyek ini, karena pelabuhan Pulau Baai merupakan jalur utama distribusi

Saadiah Uluputty
Anggota Komisi V DPR RI

berjalan. Usai tinjauan lapangan, delegasi Komisi V DPR melakukan pertemuan bersama Pelindo dan jajaran kementerian terkait, untuk mendengarkan paparan progres pengerukan. Dari paparan yang disampaikan para mitra, menunjukkan

bahwa pengerukan sudah memasuki tahap penting, namun perlu percepatan untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.

Saadiah menjelaskan, banyak harapan yang digantungkan pada proyek ini, karena pelabuhan Pulau Baai merupakan jalur utama distribusi barang dan kebutuhan pokok ke Pulau Enggano serta wilayah lain di Bengkulu.

"Dengan terbukanya jalur pelayaran ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi lokal semakin meningkat dan mobilitas warga semakin mudah. Kita semua di Komisi V DPR RI, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar pembangunan infrastruktur benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

ica,eki/mh

BUMN Pariwisata Berhasil Menata Kawasan Borobudur

Kawasan Candi Borobudur pada dua tahun terakhir terus ditata. Hasilnya, terlihat lebih baik. Yang krusial adalah relokasi para pedagang ke tempat khusus. Setelah dipindahkan, ternyata kawasan para pedagang kian ramai dikunjungi dan meningkatkan penghasilan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pesat destinasi wisata Candi Borobudur. Ia menegaskan bahwa perubahan

nyata yang terjadi selama dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan program kerja dan kepemimpinan yang tepat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut.

"Hari ini kunjungan kerja Komisi VI DPR RI, melihat perubahan nyata di Borobudur ini. Saya terakhir

kunjungan kerja dua tahun yang lalu melihat kondisi before and after. Dua tahun ini begitu banyak perubahan di Candi Borobudur yang kita bisa lihat secara langsung. Ini menambah optimisme kami di Komisi VI sebagai AKD DPR yang mengawasi bidang BUMN," kata Andre di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (12/07/2025) lalu.

Andre menilai transformasi tersebut tidak hanya mencakup perbaikan fisik destinasi, namun juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI juga berdialog langsung dengan para pedagang di area Borobudur.



Tim Kunjungan Kerja Komisi VI foto bersama dengan jajaran Deputi di Kementerian BUMN, Dirut InJourney, serta Dirut TWC di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, hari Sabtu (12/07/2025).



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).

"Tadi bukan hanya perubahan secara bentuk fisik tetapi bagaimana kita melihat bahwa masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Kita berdiskusi langsung dengan para pedagang bahwa ekonomi dan tingkat kesejahteraan mereka meningkat," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Andre juga menyoroti keberhasilan program relokasi pedagang yang sempat dikhawatirkan akan menyulitkan

pelaku usaha kecil. Nyatanya, relokasi justru membawa dampak positif bagi peningkatan penghasilan dan kenyamanan berjualan.

"Dengan relokasi yang kemarin dua tahun lalu, ditakutkan bahwa relokasi itu akan membuat pedagang semakin sulit. Ternyata dengan relokasi mereka punya kios yang lebih baik, dan ternyata pembeli lebih banyak serta tingkat kesejahteraan mereka juga meningkat," ungkapnya.

Andre juga menegaskan bahwa transformasi Candi Borobudur sudah berada di jalur yang tepat dan DPR RI berharap pengembangan ke depan dapat terus ditingkatkan agar menjadi magnet pariwisata nasional dan internasional. "Menurut saya, transformasi Candi Borobudur sudah berjalan dengan baik dan harapan kami di DPR tentu bisa lebih ditingkatkan," tutupnya.

Turut hadir sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan utama, antara lain: Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI Dwi Ary Purnomo, Direktur Utama PT Aviara Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney Ibu Maya Watono, serta Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Febrina Intan.

Program Tiga Juta Rumah

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, menegaskan pentingnya kesiapan Perumnas dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kunjungan ini untuk lebih memahami, mendalami, dan mengetahui program Perumnas terkait dengan Astacita, khususnya program-program untuk menciptakan perumahan 3 juta, 1 juta di kota dan 2 juta di desa," ujar Nurdin kepada Parlemenaria di Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025) silam.

Menurutnya, pembangunan satu juta unit rumah di wilayah perkotaan harus menjadi prioritas utama Perumnas sebagai ujung tombak pelaksanaan program tersebut. Komisi VI ingin memastikan sejauh mana kesiapan Perumnas dari sisi lokasi, lahan, serta pendanaan untuk merealisasikan target tersebut.

"1 juta ini tentu menjadi prioritas daripada Perumnas sebagai ujung tombak yang bisa merealisasikan harapan Pak Prabowo untuk membangun perumahan 1 juta itu. Itu yang kita ingin tahu, seberapa jauh kesiapan Perumnas, tidak hanya dari sisi lokasi lahan, tapi termasuk pendanaan itu," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Nurdin menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga sangat penting, termasuk dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Semen Indonesia (SIG). Kedua sektor ini disebut sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pembangunan rumah bagi masyarakat.

"BTN itu merupakan supporting utama untuk mewujudkan perumahan 3 juta itu," katanya.

mun,ais/mh

“

Transformasi tersebut tidak hanya mencakup perbaikan fisik destinasi, namun juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Andre Rosiade
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI



Ketua Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke KEK Sei Mangkei, Bane Raja Manalu saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (11/7/2025).

Pasokan Gas Masih Jadi Masalah di KEK Sei Mangkei

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, masih menghadapi masalah pasokan gas. Ini adalah hambatan utama pembangunan KEK Sei Mangkei. Persoalan ini tentu menghambat kehadiran investor ke kawasan tersebut.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, menegaskan bahwa persoalan energi, khususnya gas, masih menjadi hambatan utama bagi investor di KEK Sei Mangkei. "Gas menjadi persoalan mendasar yang menghambat investor datang dan berkembang di KEK

Sei Mangkei. Pemerintah pusat dan daerah harus segera mengambil langkah konkret agar investor tetap mau masuk dan berinvestasi di sini," tegas Bane di Simalungun, Sumut, Jumat (11/7/2025) lalu.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini, juga menekankan percepatan pembangunan infrastruktur pipa gas, mengingat KEK Sei Mangkei

sebagai KEK pertama di Indonesia yang belum memiliki jaringan pipa gas yang mendukung operasional industri secara optimal. "Kita dorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera membangun jaringan pipa gas di KEK Sei Mangkei agar para investor bisa mendapatkan harga gas yang lebih kompetitif, sehingga bisa mengurangi biaya operasional," imbu legistator Dapil Sumut III ini.

Selain itu, aspek ketenagakerjaan pun tak luput menjadi sorotan. Bane mempertanyakan data konkret terkait jumlah warga lokal yang telah bekerja di kawasan KEK Sei Mangkei ini serta peta jalan keterampilan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri. "Kami ingin memastikan pembangunan KEK membawa

manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Gap keterampilan yang ada harus segera dijemput agar warga lokal dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan industri tenant di kawasan ini,” tandasnya.

Sementara itu Direktur KEK Sei Mangkei, Arif Budiman menjelaskan bahwa menurut catatan dari dinas ketenagakerjaan dan data dari internal, KEK sudah menyerap tenaga kerja 6.166 orang, 52,7 persen merupakan tenaga kerja lokal.

“Hasil inventarisasi internal kami memang kebanyakan tenaga kerja lokal berasal dari Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Kita juga akan melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan setempat, agar para lulusan SMK bisa diserap oleh KEK Sei Mangkei,” terang Arif.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza yang ikut serta dalam kunjungan ini, menyinggung peranan pemerintah daerah



Pemerintah pusat dapat memberikan insentif investasi dan membantu penyediaan infrastruktur. Sementara pemerintah daerah dapat berperan dalam menyiapkan kerangka investasi yang menarik bagi investor

Rycko Menoza
Anggota Komisi VII DPR RI

(Pemda), baik kabupaten maupun provinsi dalam pengembangan KEK

Sei Mangkei. Menurutnya, untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan KEK, diperlukan sinergi antara pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat dapat memberikan insentif investasi dan membantu penyediaan infrastruktur. Sementara pemerintah daerah dapat berperan dalam menyiapkan kerangka investasi yang menarik bagi investor dan menyiapkan infrastruktur di luar kawasan,” tandas Rycko kepada Parlemenaria di Sei Mangkei, Jumat (11/7/2025) lalu.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, KEK perlu didukung pemerintah daerah, baik Pemkab maupun Pemprov dengan pengembangan kawasan wisata sebagai fasilitas penunjang di sekitarnya, sehingga bisa semakin menarik perhatian para investor baik nasional maupun internasional.

Beberapa pilihan wisata terdekat dari KEK Sei Mangkei di Simalungun antara lain Green Star Park Simalungun, Pemandian Umbul, Pemandian Air Panas Teluk Sibayan, dan Masjid Agung Al Munawwaroh. Selain itu, ada juga pilihan lain seperti Dogi Park, Waterboom Indrapura, Taman Miniatur Dunia, dan Banyuwangi Water Park.

“Saya melihat sudah mulai banyak investor yang membangun pabriknya di sini. Investor multinasional tersebut mungkin memerlukan fasilitas-fasilitas penunjang seperti tempat wisata untuk menarik minat mereka,” ungkap legislator asal Dapil Lampung ini.

Mantan Bupati Lampung Selatan periode 2010-2015 ini juga menerima laporan dari Direksi KEK Sei Mangkei perihal masih mahal harga gas industri yang ditawarkan pemerintah, sehingga memicu tingginya biaya operasional di sini. Ia berjanji akan menyampaikan permasalahan tersebut dengan mitra kerja terkait dalam rapat di DPR.  oji/mh



Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (11/7/2025).

FOTO: OJI/VEL

Sekolah Rakyat memutus Rantai Kemiskinan

Keberadaan sekolah rakyat (SR) diharapkan kelak bisa memutus rantai kemiskinan di tengah masyarakat. Gagasan membangun SR bisa menjadi solusi mengurai kemiskinan yang pelik di Tanah Air. Akses pendidikan bagi kaum miskin ekstrem bisa terpecahkan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, menegaskan

pentingnya kehadiran SR sebagai solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan spesifik ke Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, yang kini menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program SR di bawah naungan Kementerian Sosial RI.

"Kami melihat langsung bagaimana persiapan sekolah rakyat di Sentra Pangudi Luhur ini. Fasilitasnya luar biasa, bahkan lebih lengkap dari sekolah umum. Ada iPad, komputer, laboratorium komputer, lapangan olahraga, hingga asrama. Ini patut diapresiasi," ujar Wachid kepada Parlemenaria di Bekasi, Jumat (11/07/2025) lalu.

Meski memuji kesiapan fasilitas, Wachid menekankan pentingnya memperjelas proses seleksi penerimaan siswa, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum masuk dalam skema seleksi saat ini. "Kalau ada

anak yang tidak lolos seleksi padahal miskin, lalu bagaimana solusinya? Ini perlu dibahas. Selain itu, perhatian jangan hanya pada anak, tapi juga bapak dan ibunya. Kemandirian orangtua juga penting agar program ini berdampak jangka panjang," jelas

politisi dari Fraksi Gerindra.

Ia juga mengatakan, program SR sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34, yang menyebut bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. "Ini bentuk nyata pelaksanaan konstitusi oleh Pak Prabowo untuk menyiapkan generasi emas 2045," katanya. Program SR ditargetkan mencapai 100 lokasi pada tahun ini. Komisi VIII telah mendorong penambahan anggaran untuk realisasi program ini di tahun 2026. "Kami sudah menyiapkan dukungan anggaran tambahan untuk Kemensos agar pelaksanaan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran," katanya.

Namun, menurutnya, tantangan utama saat ini adalah ketersediaan lahan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari kepala daerah di seluruh Indonesia. "Pak Prabowo sudah mencanangkan bahwa setiap kabupaten/kota harus punya minimal satu Sekolah Rakyat. Tapi kendalanya sekarang ada di lokasi. Kami minta bupati, wali kota, dan gubernur ikut aktif menyiapkan lahan," tutupnya.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, saat memimpin Kunjungan Spesifik ke Sekolah Rakyat Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/07/2025).



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Janurutmoko, saat bertukar cinderamata usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kulon Progo, Provinsi DIY, Jumat, (11/7/2025).

Asrama Haji di Yogyakarta

Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Asrama Haji di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Janurutmoko, menegaskan bahwa pembangunan asrama haji di DIY merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, selama ini jemaah haji asal Yogyakarta harus diberangkatkan melalui embarkasi Solo (Surakarta), yang jaraknya cukup jauh dan memerlukan waktu serta biaya tambahan.

"Dengan adanya asrama haji sendiri di DIY, proses pemberangkatan jemaah akan lebih efisien dan terkoordinasi. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas layanan haji secara menyeluruh," ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini di Kulon



Dengan adanya asrama haji sendiri di DIY, proses pemberangkatan jemaah akan lebih efisien dan terkoordinasi

Singgih Janurutmoko
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Progo, DIY, Jumat, (11/7/2025) lalu.

Komisi VIII juga mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Agama mempercepat proses administrasi serta penyiapan lahan pembangunan. Dalam kunjungan tersebut, hadir pula perwakilan Sekretariat Jenderal Kemenag dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan

Umrah yang meninjau kesiapan lokasi dan dukungan infrastruktur yang tersedia.

Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Agama, setiap tahun lebih dari 3.000 calon jemaah haji asal DIY diberangkatkan melalui embarkasi luar provinsi. Kehadiran asrama haji akan menjadikan DIY sebagai embarkasi penuh atau paling tidak embarkasi antara yang akan menghemat biaya operasional, mempermudah manajemen kloter, dan memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Singgih menambahkan bahwa asrama haji juga dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah. "Asrama haji ini nantinya akan menjadi kawasan yang hidup, bukan hanya musiman saat musim haji. Bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-keagamaan, pelatihan, hingga wisata religi," jelasnya. **upi,uf/mh**



FOTO: ANDRI/VEL

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, bersama tim saat kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Kamis (04/07/2025).

Transformasi Pendidikan Vokasi Kesehatan

Komisi IX DPR RI terus memberi perhatian serius pada penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi kesehatan dengan roadmap transformasi kesehatan nasional yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Tujuannya menguatkan layanan primer, promotif, dan preventif.

Di Palembang, Sumatera Selatan, delegasi Komisi IX DPR RI mengunjungi kampus Politeknik Kesehatan (Poltekkes) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melihat dari dekat kegiatan belajar dan penerapan kurikulumnya. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menegaskan bahwa lulusan Poltekkes tidak hanya dituntut kompetensi teknis semata, tapi juga harus memahami konteks pelayanan kesehatan di tingkat primer, termasuk di Puskesmas, klinik, dan layanan berbasis komunitas.

"Kami berharap Poltekkes mampu mencetak tenaga kesehatan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan layanan kesehatan masa

depan," ujarnya, di Palembang, Kamis (4/7/2025) lalu. Pendidikan vokasi dinilai sangat relevan dengan semangat transformasi yang menekankan penguatan layanan primer, promotif, dan preventif. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, juga memberikan perhatian terhadap distribusi SDM kesehatan yang belum merata di berbagai daerah.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan lulusan Poltekkes bisa menjangkau wilayah terpencil dan kekurangan tenaga kesehatan. Dengan kebijakan yang tepat sasaran, lulusan Poltekkes di masa depan diharapkan menjadi ujung tombak dalam layanan promotif-preventif, sekaligus mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Poltekkes Palembang, Muhamad Taswin, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai menyesuaikan beberapa program studi dengan kebutuhan layanan primer. Namun, ia menekankan perlunya dukungan dalam bentuk penguatan sarana, pengembangan alat praktik kompetensi, dan penambahan program studi spesialisasi yang sesuai dengan tren penyakit dan kebutuhan masyarakat.

Sementara di Denpasar, Bali, Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyoroti pentingnya peran tenaga ahli gizi dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemberian makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Muazzim menyampaikan ini Poltekkes Kemenkes Denpasar, Bali, Rabu (3/7/2025) lalu.

Menurut Muazzim, Poltekkes Denpasar memiliki 13 jurusan, termasuk jurusan gizi dan keperawatan, yang sangat relevan dengan kebutuhan nasional saat ini. Ia menekankan bahwa program



Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, saat kunjungan kerja Komisi IX ke Poltekkes Kemenkes Denpasar, Bali, Rabu (3/7/2025).

makan bergizi gratis (MBG) bukan semata-mata bertujuan untuk mengenyangkan, melainkan harus menjadi sarana membangun generasi emas Indonesia melalui asupan gizi berkualitas.

"Bukan sekadar kasih makan agar kenyang, tapi bagaimana makan itu betul-betul bergizi, karena ini menyangkut masa depan generasi kita menuju Indonesia Emas," ujar politisi Fraksi PAN ini.

Muazzim menyampaikan bahwa saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas gizi dalam program MBG di sekolah. Salah satu penyebabnya, kata dia, kurangnya ahli gizi yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penyajian makanan, baik di dapur maupun di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Mohon maaf, saat ini kita lihat masih ada makanan bergizi yang

tidak sesuai standar. Bisa jadi karena dapur atau SPPG-nya belum memiliki ahli gizi yang cukup," imbuhnya.

Karena itu, Muazzim mendorong kerja sama konkret antara Poltekkes Denpasar dan Badan Gizi Nasional yang ada di Provinsi Bali, agar para lulusan dapat langsung terlibat dalam program ini. "Setiap dapur yang melayani program makan bergizi ini harus punya minimal satu ahli gizi. Karena yang harus dilayani bukan hanya anak-anak PAUD sampai SMA, tapi juga ibu hamil dan menyusui. Kebutuhannya bisa ribuan," tegasnya.

Komisi IX DPR RI berharap agar ke depan peran institusi pendidikan vokasi kesehatan, khususnya jurusan gizi, semakin strategis dalam menyokong kebijakan nasional di bidang kesehatan dan ketahanan gizi. — man.ysm/mh

Mengawasi Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Komisi X DPR RI sedang intens mengawasi proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek yang rencananya rampung pada Agustus 2025 ini, mendapat perhatian serius saat Komisi X berkunjung ke Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Jawa Tengah.

berbeda, sehingga perlu direkam ulang sehingga muatannya dapat komprehensif.

"Pertama, tidak ada absolutisme dalam penulisan sejarah, yang berarti penulisan sejarah harus terbuka bagi berbagai perspektif, setiap masa harus ditulis ulang, ada perubahan, ada dinamika, ada geopolitik, sosial ekonomi yang berbeda," tegas legislator dari daerah pemilihan Jateng IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

Tak hanya itu, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mendorong agar penulisan sejarah tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Ia berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam merekam peristiwa masa lalu. "Sejarah tidak

Delegasi Komisi X diterima Rektor UNDIP, Suharnomo. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi dinamika penulisan sejarah di Indonesia. "Alhamdulillah, saya kira ini kunjungan spesifik, bertemu dengan para penulis yang sedang digagas oleh Kemenbud. Saya mencatat dinamika ini bagus," ujar Fikri dalam forum tersebut, Kamis (3/7/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Fikri menekankan pentingnya penulisan ulang sejarah secara berkala. Menurutnya, setiap masa memiliki perubahan, dinamika, serta geopolitik, sosial, dan ekonomi yang



Penulisan sejarah harus terbuka bagi berbagai perspektif

Abdul Fikri Faqih
Anggota Komisi X DPR RI



FOTO: HIRANVEL

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih saat kunjungan kerja spesifik ke Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025).

hanya ditulis pemerintah, semua pihak harus bisa menulis,” tambahnya.

Terakhir, Fikri berpesan agar Kemenbud bisa menjaga akuntabilitas dan transparansi program penulisan sejarah. “Menteri Kebudayaan diharapkan dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi program penulisan sejarah,” pungkasnya.

Masih di Semarang, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong transparansi dalam penulisan ulang sejarah Indonesia, yang tengah dilaksanakan pemerintah melalui Kemenbud. Ia menilai, hingga kini tidak pernah ada kejelasan di ruang publik mengenai siapa saja 113 orang yang disebut-sebut menjadi penulis dalam proyek besar tersebut.

“Sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa 113 orang itu, hanya editor umumnya saja yang kita ketahui. Bahkan juga ada santer kabar, ada asisten yang mengerjakan,” tegas Bonnie kepada Parlemenaria.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI di bidang kebudayaan, khususnya terkait proyek penulisan sejarah nasional yang saat ini dikerjakan di bawah koordinasi Kemenbud. Di Universitas Diponegoro, Komisi X mendengarkan masukan publik, mulai akademisi, pegiat budaya, sejarawan, aktivis, pemerhati budaya, hingga guru.

Ia melanjutkan, bila benar yang ditugaskan adalah para sejarawan dengan reputasi baik, maka mereka sendirilah yang seharusnya menulis, bukan menyerahkannya kepada asisten. “Kalau misalkan 113 sejarawan ini reputasinya bagus, maka mestinya dialah yang mengerjakan, sehingga tanggung jawab intelektualnya, akademisnya, bahkan bobotnya bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Bonnie mengungkapkan bahwa sejak awal proyek penulisan ini dirancang pemerintah, Komisi X mendorong dilaksanakannya uji publik dan sosialisasi sedini



FOTO: HIRA/VEL

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana saat mengikuti kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025).



Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI di bidang kebudayaan, khususnya terkait proyek penulisan sejarah nasional

Bonnie Triyana
Anggota Komisi X DPR RI

mungkin, guna mencegah polemik. Namun kenyataannya, kontroversi

tetap muncul akibat kurangnya keterbukaan.

“Sejak proyek ini bermula, saya adalah orang yang pertama mempertanyakan siapa yang menulis, dan juga saya yang mengusulkan saat itu bersama teman-teman di Komisi 10 juga untuk melaksanakan uji publik dan sosialisasi sesegera mungkin untuk menghindari kontroversi. Dan memang pada akhirnya tetap terjadi,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Bonnie berharap penulisan ulang sejarah Indonesia ini benar-benar dilakukan secara akuntabel, dengan melibatkan para pihak yang memang kompeten dan diketahui publik. Terkait mekanisme uji publik, Bonnie mengingatkan agar uji publik tidak dijadikan formalitas semata, melainkan menjadi wadah nyata untuk menyerap masukan masyarakat secara luas. **hal/mh**

Suku Bunga Kredit Turun, Permintaan Kredit Tumbuh

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 20-21 Mei 2025 lalu, memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,50 persen. Keputusan ini dilandasi perkiraan inflasi yang rendah dan terkendali, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penurunan suku bunga ini didukung Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Harapannya, dengan turunnya suku bunga kredit, permintaan dan penyaluran kredit terus tumbuh.

Apalagi, pertumbuhan kredit tercatat melambat menjadi 9,16 persen (yoy) pada Maret 2025. Maka, dengan kredit yang terus tumbuh, aktivitas ekonomi juga semakin menggeliat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kunjungan Komisi XI ke Kantor Perwakilan BI Bali pada Rabu (28/05/2025) lalu ini, dihadiri otoritas BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Puteri menyerukan BI dan OJK bersinergi lebih kuat lagi untuk memastikan kebijakan



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu (28/05/2025).

penurunan suku bunga acuan dapat ditransmisikan dalam penyaluran kredit perbankan. Kebijakan ini akan berdampak pada pertumbuhan kredit dengan memerlukan waktu kisaran satu tahun.

“Dengan gap waktu yang cukup lama, tentu hal ini patut menjadi perhatian, supaya BI bersama OJK dapat memastikan penurunan suku bunga dapat segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan,” ujar Puteri. Ia juga mengapresiasi pengembangan digitalisasi pembayaran di kawasan pariwisata melalui QRIS tap yang telah diinisiasi BI. Inovasi ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran, tanpa perlu memindai kode QR.

“Pada sektor pariwisata, QRIS tap ini sudah dilakukan uji coba di Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Tapi, Bali belum dilakukan uji coba. Maka, saya turut mendorong BI menerapkan QRIS ini pada destinasi pariwisata yang ada di Pulau Bali. Dengan begitu, wisatawan juga semakin memudahkan dalam transaksi pembayaran,” ungkap Puteri.

Penurunan Angka Kemiskinan

Sementara di Maggarai Barat, NTT, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menyoroti tingginya angka kemiskinan di NTT yang hampir mencapai 20 persen. Baginya, angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang kini sudah berada di bawah 10 persen.

Mempelajari data tersebut, ia menilai permasalahan kemiskinan di NTT berkaitan erat dengan rendahnya variasi jenis pekerjaan sekaligus lemahnya perhatian terhadap sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan pada kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten



Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/05/2025).

Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/05/2025) lalu.

“Tingginya tingkat kemiskinan ini, kan, kaitannya dengan tingkat pertumbuhan kerja. Jenis-jenis pekerjaan di sini tidak bervariasi, mayoritas masih di sektor pertanian. Nah, ketika sektor pertanian tidak diperhatikan, otomatis angka kemiskinan juga tetap tinggi,” ujar Andi kepada Parlemenaria.

Menurut Andi, pembangunan di NTT membutuhkan pendekatan yang afirmatif dari pemerintah pusat, khususnya dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya afirmasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.



Pembangunan di NTT membutuhkan pendekatan yang afirmatif dari pemerintah pusat

Andi Yuliani Paris
Anggota Komisi XI DPR RI

“Yang perlu dilakukan adalah afirmasi. Afirmasi terhadap APBN, untuk sektor-sektor pembangunan infrastruktur pertanian, infrastruktur pariwisata, infrastruktur pendidikan, dan layanan sosial lainnya,” tegasnya. Legislator Fraksi PAN itu menambahkan bahwa afirmasi APBN ini harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan persentase alokasi anggaran yang diarahkan langsung ke NTT, sehingga dapat menjawab tantangan struktural yang dihadapi daerah ini.

“Jadi NTT membutuhkan afirmasi terkait dengan persentase APBN yang memang dialokasikan khusus untuk menjawab ketertinggalan infrastruktur dan ekonomi,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan lembaga-lembaga terkait dapat lebih responsif terhadap kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti NTT.

Dengan intervensi anggaran yang terarah dan berpihak, ia optimistis angka kemiskinan di NTT dapat ditekan secara bertahap. “Kalau infrastruktur dasar sudah diperbaiki dan sektor pertanian serta pariwisata dikembangkan secara maksimal, lapangan pekerjaan akan terbuka dan kemiskinan bisa diturunkan,” pungkasi Andi. [bia,skr/mh](#)



FOTO: YASMIN/VEL

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto bersama tim saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Nitikan di Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025).

Kemandirian Energi dan Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan

Komisi XII DPR RI masih terus menyoroti kemandirian energi dan pengelolaan lingkungan. Secara khusus Komisi XII melihat dari dekat proyek pengelolaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah di daerah.

Di Yogyakarta, delegasi Komisi XII mengunjungi TPS3R Nitikan. Infrastruktur pengelolaan sampah harus dibangun. Wakil Ketua Komisi

XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sabtu (19/7) lalu, menjelaskan, TPS3R Nitikan mampu mengelola 60 ton sampah per hari, mengubah sampah organik menjadi pupuk dan anorganik menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).

Sampah daur ulang ini bahkan dikirim ke pabrik semen di Cilacap sebagai bahan bakar.

"Dalam sehari, TPS3R Nitikan mampu mengelola kurang lebih 60 ton sampah. Sampah yang masuk dipilah secara organik dan anorganik. Yang organik diproses menjadi pupuk, sedangkan yang anorganik diolah menjadi RDF sebagai bahan bakar alternatif," ungkap Sugeng.

Model ini menjadi contoh penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (R3) yang produktif. Meskipun demikian, Sugeng mengakui bahwa masih ada tantangan besar dalam pengelolaan sampah nasional, di mana 55 persen dari 40 juta ton sampah tahunan belum tertangani dan berakhir di open dumping, menyebabkan pencemaran lingkungan.

Ia menekankan, perlunya memperluas keberadaan TPS3R dan menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas nasional yang terintegrasi dalam sistem infrastruktur, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. "Pengelolaan sampah harus jadi bagian dari sistem

infrastruktur nasional. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga harus jadi gerakan bersama pemerintah daerah dan masyarakat," pungkasnya.

Sementara di Sidrap, Sulawesi Selatan, Komisi XII berkunjung ke Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) untuk mendukung target bauran energi baru dan energi terbarukan (EBET) nasional sebesar 25 persen pada tahun 2030.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengapresiasi kontribusi signifikan PLTB Sidrap yang mampu menghasilkan 202,9 megawatt dan menerangi sekitar 42.000 rumah tangga.

"Kita punya target bauran energi bersih sebesar 25 persen dalam sistem grid nasional pada tahun 2030. Saat ini secara nasional baru tercapai sekitar 13 persen. Namun di Sulawesi sudah mencapai 34 persen. Ini tentu menjadi contoh dan capaian yang membanggakan," ujar Dony di PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan, Kamis (18/7) lalu.

Ia mengungkapkan bahwa capaian itu jauh melampaui rata-rata nasional yang baru 13 persen, menjadikan wilayah ini sebagai



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat memimpin kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Sulawesi Selatan.

penyumbang EBET tertinggi di Indonesia. Komisi XII mendorong eksplorasi lebih lanjut potensi energi bayu di wilayah lain seperti selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. "Kita memiliki sumber daya yang besar untuk pengembangan energi bayu. Potensinya tersebar di

Sulawesi, selatan Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Ini harus terus diobservasi dan dikembangkan agar dapat mendukung pencapaian target energi bersih nasional," tambah Dony.

Terakhir, di Surabaya, Anggota Komisi XII Ramson Siagian dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya menekankan pentingnya swasembada energi sebagai kunci pendorong daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi. "Untuk masyarakat, dengan meningkatnya swasembada energi, industri-industri kita yang memerlukan energi seperti gas itu bisa berkembang, karena beban energi akan lebih murah, lebih kompetitif," jelas Ramson di Surabaya, Kamis (17/7) silam.

Menurut Ramson, dengan swasembada energi, beban biaya energi untuk industri akan lebih murah, membuat produk lebih kompetitif di pasar global maupun domestik. "Kalau industri berkembang, ini akan menambah lapangan pekerjaan. Kalau menambah lapangan pekerjaan akan bagus untuk masyarakat, akan meningkatkan konsumsi masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi," lanjutnya. est.go.id/ysm/mh



Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian saat mengikuti kunjungan kerja Surabaya.



FOTO: HUSEN/VEL

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara saat pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasarakatan Bali.

Di Bali, Komisi XIII menyoroti pengawasan ketat terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara, memimpin rapat dengar pendapat dengan otoritas Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasarakatan Bali. Dijelaskan, pada tahun 2024 angka kunjungan wisatawan asing mencapai 14.045.403.

"Ini tentu mendorong risiko meningkatnya pelanggaran keimigrasian seperti penggunaan visa tidak sesuai peruntukan (visa abuse) serta meningkatnya potensi tindak pidana kejahatan transnasional yang dilakukan WNA, sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi jajaran Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian," ungkap Dewi di Kanwil Imigrasi Bali, Denpasar, Jumat (18/7) silam.

Permohonan visa izin tinggal di Bali merupakan yang tertinggi di Indonesia. Ini memang menuntut

Apresiasi Kinerja Imigrasi dan Lapas di Bali dan Yogyakarta

Komisi XIII DPR RI menunjukkan fokusnya pada peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem hukum di Indonesia melalui dua kunjungan kerja penting ke Bali dan Yogyakarta. Isu yang dibahas adalah imigrasi dan lembaga pemasyarakatan

pengawasan yang ketat otoritas imigrasi Bali. Dewi mengapresiasi kinerja Imigrasi Bali dalam meningkatkan layanan keimigrasian,

termasuk penerbitan paspor dan visa, serta pengawasan terhadap WNA. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyalahgunaan izin

tinggal menjadi pelanggaran pidana yang paling umum terdeteksi.

Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan yang antisipatif. "Kami memahami bahwa tugas ini tidak mudah, mengingat dinamika yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya arus mobilitas global. Bali adalah daerah pariwisata

Lapas Kelas IIB Sleman (Cebongan). Anggota Komisi XIII DPR RI Rizal Aziz, mengapresiasi tata kelola Lapas Cebongan ini. Rizal menilai, Lapas Cebongan sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dikunjungi Komisi XIII.

"Alhamdulillah, pada hari ini kami langsung meninjau ke lokasi, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman. Kalau diperhatikan, kami Komisi XIII sudah

banyak berkunjung ke lapas-lapas di seluruh Indonesia, tetapi ini salah satu Lapas yang terbaik," ujar Rizal, Jumat (18/07) lalu. Rizal terkesan dengan kebersihan lingkungan Lapas, penataan yang rapi, serta disiplin dan pembinaan terstruktur bagi warga binaan. Ia juga menyoroti hasil kerajinan tangan warga binaan yang berkualitas.

"Narapidananya saya lihat betul-betul diajarkan bagaimana



Anggota Komisi XIII DPR RI, Rizal Aziz, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII ke Lapas Kelas IIB Sleman (Cebongan), Yogyakarta.

internasional yang memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan warga negara asing

"Oleh sebab itu, pengawasan keimigrasian di Bali membutuhkan sinergi lintas sektor serta penguatan kapasitas kelembagaan yang antisipatif dan korektif terhadap kebijakan tanpa menghambat iklim investasi dan pariwisata," pungkas Dewi.

Sementara dari Yogyakarta, delegasi Komisi XIII DPR RI mengunjungi

“

**Narapidananya
saya lihat betul-
betul diajarkan
bagaimana tertib di
dalam tahanan.**

Rizal Aziz
Anggota Komisi XIII DPR RI

tertib di dalam tahanan. Kami juga melihat hasil kerajinan warga binaan seperti kue dan kerajinan lainnya yang cukup bagus," tambah politisi Fraksi PAN ini. Rizal berharap, standar tinggi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Kami dari Komisi XIII puas dengan Kalapas-nya, dan harapan saya ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Ini jadi salah satu contoh terbaik dari pengelolaan lapas di Indonesia," tegas Rizal. **mh,blf/mh**

Penulisan Ulang Sejarah Butuh Partisipasi Publik

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) sedang melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Namun, upaya ini tak luput dari pro dan kontra. Sejumlah akademisi, sejarawan, budayawan, dan organisasi masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran potensi politisasi sejarah, pendekatan yang terlalu sentralistik, serta pengabaian perspektif minoritas, perempuan, dan daerah yang selama ini kurang terwakili. Kekhawatiran utama adalah munculnya narasi tunggal yang justru bisa mengaburkan keberagaman pengalaman historis bangsa.



FOTO: EOT/ENNO/VEL

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Penulisan ulang sejarah ini meliputi awal lahirnya masyarakat Nusantara hingga pasca-reformasi. Penyelesaian penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan rampung bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

Alasan utama penulisan ulang sejarah tersebut, menurut Kemenbud untuk menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan. Nantinya, hasil penulisan ulang ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan

Wacana penulisan ulang sejarah ini mendapat perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menekankan pentingnya transparansi dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia kepada publik. Ia mengingatkan agar penulisan ulang sejarah tidak mengaburkan fakta sejarah yang pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah.



Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati.



Anggota Komisi X Mercy Chriesty Barend.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini, juga mengingatkan agar semangat 'Jas Merah' yang digaungkan Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI, Sukarno, tetap dipegang teguh. Puan juga meminta Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah) dijadikan pedoman terkait rencana penulisan ulang sejarah bangsa.

Sementara itu, Komisi Pendidikan DPR menyatakan komitmennya mendukung proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan RI. Namun, dukungan itu disertai sejumlah catatan penting, agar proses tersebut dilakukan secara ilmiah, terbuka, dan bebas dari kepentingan politis.

"Komisi X mendukung penuh upaya penulisan sejarah ini, karena banyak peristiwa penting bangsa yang selama ini belum terdokumentasikan secara utuh. Tetapi kami juga menekankan pentingnya proses yang transparan dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah.

Himmatul menjelaskan bahwa penulisan sejarah Indonesia merupakan agenda kebudayaan yang krusial, mengingat sejarah nasional belum diperbarui sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ia

“

**Pentingnya
transparansi dalam
proses penulisan
ulang sejarah
Indonesia kepada
publik.**

Puan Maharani
Ketua DPR RI

menegaskan, sejarah adalah sesuatu yang dinamis dan terus berkembang, sehingga perlu terus ditulis agar generasi mendatang memiliki rekam jejak historis yang utuh dan objektif.

Ia juga menekankan pentingnya uji publik dalam proses ini, guna menjangkau masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas adat, sejarawan lokal, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, hal ini penting agar narasi sejarah yang ditulis benar-benar mencerminkan keberagaman pengalaman kolektif bangsa.

Selain Himmatul, Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk akademisi,

budayawan, dan komunitas adat, agar narasi yang dihasilkan mencerminkan keragaman memori kolektif bangsa.

Ia menekankan bahwa narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah. "Penulisan ini bukan hanya mencatat masa lalu, tetapi menjadi pondasi identitas nasional ke depan," jelasnya.

Anggota Komisi X Mercy Chriesty Barend merinci sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian serius dalam penulisan sejarah ini. Pertama, mengenai narasi tunggal versus kebenaran beragam. Menurutnya, penulisan sejarah tidak boleh menjadi narasi dan kebenaran tunggal, melainkan harus merepresentasikan kekayaan dan keragaman budaya lokal di setiap daerah secara benar, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Kemudian, buku sejarah harus betul-betul mengangkat seluruh kebudayaan Indonesia tanpa mengarah pada kepentingan politik tertentu. Terakhir, ia mengingatkan pentingnya dialog publik. "Jangan sampai kemudian ditulis dalam satu agenda tertentu dan dipaksakan harus diluncurkan pada tanggal 17 Agustus. Karena itu, dialog publik diperlukan," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. **— bia/mh**



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri (kanan) bersama delegasi Indonesia pada kegiatan Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue yang digelar oleh IPU pada Jumat (20-6-2025).

Salah satu anggota parlemen Inggris menyampaikan pandangan negatif ini pada forum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, Juni silam. Sentimen negatif parlemen Inggris terjadi pada sesi general debate dengan tema 'Parliamentarians in dialogue with Religion and Belief: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future'.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan responnya. Irine menolak dengan tegas tuduhan tersebut. Hal itu disampaikan saat Indonesia mendapat giliran berbicara. Irine menegaskan, pernyataan anggota parlemen Inggris tidak berdasar dan tidak pantas disampaikan dalam

Standar Ganda Legislator Inggris

Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua dipandang negatif. Pemerintah Indonesia diminta membuka akses bagi dunia internasional ke wilayah Papua untuk pengawasan. Sentimen negatif tersebut direspon kritis oleh delegasi DPR RI.

forum yang semestinya difokuskan pada dialog damai antar-parlemen. Dengan lantang, ia menyampaikan protes dan keberatan atas sikap parlemen Inggris yang memanfaatkan

forum IPU untuk menyinggung masalah HAM di Indonesia.

"Apa yang beliau sampaikan terkait situasi hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan

yang tidak berdasar. Saya sangat menyesalkan bahwa forum yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan negara kami. Ini bukan tempat yang tepat untuk membahas isu Papua. Saya dengan tegas menolak pernyataan Anda,” tandas legislator dari Dapil Maluku Utara itu.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria, konferensi IPU ini merupakan ajang strategis bagi parlemen dunia untuk memperkuat komitmen perdamaian, inklusivitas, dan keadilan sosial. IPU sendiri merupakan organisasi global parlemen dunia yang mendorong kerja sama dan dialog antarpemerintahan semua negara.

Pada sesi ini, setiap perwakilan parlemen negara anggota IPU maju ke podium untuk menyampaikan pandangannya terkait tema diskusi. Di sinilah legislator Inggris itu lalu meminta agar pemerintah Indonesia membuka akses wilayah Papua kepada dunia internasional yang sejak era Presiden Joko Widodo ditutup.

Irine kemudian menjelaskan Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang membangun persatuan dan kepercayaan antarumat beragama melalui kebijakan inklusif dan partisipatif, berdasarkan nilai-nilai nasional. “Di Indonesia, keterlibatan seperti ini dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama masyarakat, serta pembuatan kebijakan yang inklusif yang mencerminkan nilai-nilai nasional kami, yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Irine.

Menurutnya, permasalahan yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara dialog, khususnya dalam melindungi hak-hak minoritas. Hal ini, kata Irine, membutuhkan waktu dan proses melalui kebijakan yang inklusif dan komitmen terhadap keadilan.

“Dialog ini memperkuat kepercayaan, melindungi hak-hak



Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafarez (tengah), dalam forum internasional yang membahas toleransi beragama dan Deklarasi Marrakesh di Roma, Italia, Kamis (19-6-2025).

“
Di Indonesia, keterlibatan seperti ini dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama masyarakat, serta pembuatan kebijakan yang inklusif yang mencerminkan nilai-nilai nasional kami, yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Irine Yusiana Roba Putri
Wakil Ketua BKSAP DPR RI

minoritas, dan mendorong harmoni di tengah keberagaman bangsa kami. Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan konsistensi dalam keterlibatan,

kebijakan yang inklusif, serta komitmen terhadap keadilan,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR tersebut.

Lebih lanjut, Irine menekankan peran penting parlemen Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas agama serta menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. “Di Indonesia, agama hidup berdampingan dengan kepercayaan lokal. Parlemen kami memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keberagaman agama dilindungi dan dirayakan,” sebutnya.

Menurut Irine, Indonesia telah melakukan upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas agama dan mendorong kewarganegaraan yang inklusif. Itu merupakan dasar terciptanya masyarakat yang damai. “Bahkan, sebelum kami membentuk sektor legislatif, kami telah mengesahkan UU yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi komunitas minoritas dari diskriminasi,” jelas Irine.  **we/mh**

Sofyan Tan

Wujudkan Keinginan Kuliah Anak Seorang Pemulung

Mewujudkan mimpi seorang anak yang ingin kuliah jadi kepuasan batin tersendiri. Adalah Anggota DPR RI Sofyan Tan yang berhasil membantu seorang anak pemulung bisa menikmati pendidikan tinggi.



Anggota DPR RI Sofyan Tan, saat bertemu dengan seorang ibu dari keluarga pemulung, serta memberikan bantuan beasiswa agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

“Ini libur panjang, banyak yang keluar negeri. Minimal ke Danau Toba. Tapi saya tidak, tetap turun bertemu ibu-ibu yang ingin anaknya kuliah,” aku Sofyan Tan di tengah-tengah masyarakat Desa Ujung Labuhan, Namo Mbelin, Kecamatan Namorambe dan Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Acara tersebut sengaja digelar

untuk memperingati Bulan Bung Karno yang bertepatan dengan wafatnya Sang Proklamator pada 21 Juni 1970. Dalam kesempatan itu, Tan bertemu dengan seorang ibu dari keluarga pemulung yang menyampaikan keinginan agar anaknya bisa menempuh pendidikan tinggi alias kuliah. Namun niatnya itu terpaksa ditanggalkan, mengingat biaya yang tidak mencukupi.

Mendengar hal tersebut, Tan

langsung merangkul sang ibu seraya mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Pihaknya memberikan bantuan beasiswa kepada anak tersebut untuk bisa melanjutkan pendidikannya di STIE Eka Prasetya yang notabene merupakan kampus sekaligus yayasan pendidikan yang dimilikinya.

“KIP (kartu Indonesia pintar) kuliahnya akan kami urus. Biarlah orangtua menjadi pemulung, tapi anak tetap harus menjadi sarjana dan tidak menjadi pemulung,” tegas Tan, disusul dengan ucapan syukur dan tangis haru sang ibu.

Hal serupa juga ia lakukan di beberapa wilayah lainnya di Kota Medan. Dalam kesempatan itu pihaknya menyampaikan bahwa sebagai anggota Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi pendidikan, bertekad, selama menjadi anggota DPR, ia akan terus memperjuangkan agar tidak ada anak-anak dari keluarga miskin yang putus sekolah karena ketiadaan biaya, dan tidak ada anak keluarga miskin yang tidak bisa kuliah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila yang diusung oleh Bung Karno agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah dan meraih pendidikan tinggi berkualitas.

“Untuk itulah saya selalu turun ke bawah untuk membagikan PIP dan KIP Kuliah ke pelosok-pelosok desa. Agar semua anak-anak bisa bersekolah dan dapat menempuh pendidikan dengan setinggi-tingginya,” jelasnya. — ayu/mh

Taufan Pawe Temui Konstituen di Parepare

Legislator Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI Taufan Pawe (TP) terus mendekatkan dengan masyarakat melalui kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II. Ia menggelar silaturahmi bersama dengan masyarakat Kota Parepare, di Rumah Aspirasi TP, awal Juli lalu.

Bukan kali ini saja, agenda kunjungan yang terus dilakukan TP melalui beberapa kegiatan diantaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Kundapil, hingga temu konstituen atau reses setiap masa sidang DPR RI.

TP mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai Anggota DPR RI, karena memang dalam konstitusi telah diatur bagaimana bertanggung jawab untuk terus menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan Sulsel II.

"Kami punya tanggung jawab sebagai Anggota DPR RI, bagaimana dekat dengan konstituen dan juga masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan Sulsel II. Kami terus datang di tengah-tengah masyarakat, selain untuk menyerap aspirasi masyarakat juga untuk memberikan informasi terkait pembangunan Pemerintah Pusat dan termasuk kebijakan Pemerintah Pusat kepada masyarakat," kata TP.

Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini juga berharap, agar kehadirannya di tengah masyarakat terus disambut dengan baik, dan masyarakat tidak bosan dengan kehadiran kami yang secara berkala dengan beberapa Program di DPR RI.

"Semoga tidak bosan kalau kami terus datang di tengah-tengah masyarakat, karena kami punya tanggung jawab secara moril," ucap dia. Menurut TP, saat ini sebagai Anggota Komisi II DPR RI, dirinya terus memperjuangkan berbagai hak, termasuk bagaimana melakukan pengawalan terhadap kebijakan pusat ke daerah, dan termasuk dirinya saat ini dipercaya menjadi Anggota Panja Anggaran dana Desa dan Dana Daerah. **we/mh**



Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menggelar silaturahmi dan serap aspirasi warga Parepare sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya di Dapil Sulsel II.

Annisa M.A. Mahesa

Sinergi Empat Pilar dan Asta Cita

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Banten II, Annisa M.A. Mahesa, menegaskan urgensi internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam pembangunan nasional di tengah era transformasi. Hal ini disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Rumah Aspirasi Annisa Mahesa, Kompleks Depag, Ciwaru, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Juni lalu.

Dengan mengusung tema "Meneguhkan Jati Diri Bangsa di Era Transformasi Nasional: Sinergi Empat Pilar

dan Asta Cita", kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, aktivis pemuda, perwakilan partai politik, hingga warga Kota Serang.

Dalam sambutannya, Annisa menekankan pentingnya memperkuat pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai landasan moral dan ideologis dalam menjawab tantangan zaman.

"Empat Pilar bukan sekadar fondasi negara, melainkan arah moral dan ideologis yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," tegas Annisa. Lebih lanjut, legislator dari komisi yang membidangi urusan sosial dan kemasyarakatan ini menjelaskan bahwa sinergi antara Empat Pilar dan Asta Cita, delapan agenda prioritas pembangunan nasional, sangat penting untuk menjaga arah kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat.

"Asta Cita tidak boleh dijalankan secara teknokratis semata. Harus ada ruh kebangsaan di dalamnya: keadilan sosial, kebhinekaan, dan kedaulatan rakyat, agar tetap selaras dengan semangat Pancasila," imbuhnya.  [aha/mh](#)



Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Annisa M.A. Mahesa, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Serang.

FOTO: IST/VEL

Asep Wahyuwijaya Distribusikan Bantuan Untuk Masyarakat

Anggota DPR RI Asep Wahyuwijaya, mendistribusikan ratusan paket Program Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kabupaten Bogor. Selain PMT, politisi NasDem ini juga membagikan ribuan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK, membangunkan sarana mandi cuci kakus (MCK) di sekolah, membagikan laptop dan portabel computer untuk sekolah, hingga membangunkan jalan usaha tani (JUT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Asep, bantuan ini berbeda dengan skema yang dilakukan pemerintah daerah. Sebab, bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui wakil rakyat di DPR RI ini jauh lebih cepat didistribusikan. "Bantuan yang bisa diberikan juga jauh lebih beragam," kata dia dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Distribusi bantuan ini harus dilakukan dengan cepat, mengingat jenisnya sangat bervariasi dengan rentang waktu yang cepat pula. Untuk itu, ia harus bisa mengejar waktu turun ke daerah pemilihan (dapil) dan memastikan seluruh bantuan bisa terserap dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

Untuk memastikan itu, ia melibatkan tim posko Balawa (Barisan Relawan Asep Wahyuwijaya (BALAWA) dan simpatisan Partai NasDem untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh jaringan relawan, pemerintah desa, hingga struktur partai. "Tujuannya untuk



Anggota DPR RI Asep Wahyuwijaya mendistribusikan ratusan paket makanan tambahan serta berbagai bantuan pendidikan dan infrastruktur untuk masyarakat di Kabupaten Bogor.

memetakan berbagai aspirasi dan permohonan bantuan yang dianggap relevan dan mampu dipenuhi oleh mitra komisi di DPR RI," terang dia.

Wakil rakyat asal Kabupaten Bogor ini juga mengatakan, masyarakat harus diberikan referensi politik yang baik dan berbeda atas pemahaman politik secara

komprehensif dan terus menerus. Selain itu, harus ada penguatan kesadaran politik kepada masyarakat melalui interaksi fisik, perbincangan-perbincangan, dan pendistribusian berbagai macam program bantuan kepada kelompok masyarakat sesuai kemampuan dan kewenangannya.

hir/mh

Zainul Munasichin

Gelar Dialog dengan Warga

Mentari belum terlalu terik ketika puluhan warga Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, mulai memadati halaman Mabda Islam. Mereka datang bukan sekadar berkumpul, tetapi membawa segudang harap dan keluh yang ingin disampaikan langsung kepada wakil rakyat mereka, Anggota Fraksi PKB Zainul Munasichin.



Anggota DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menggelar dialog dengan warga Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, untuk menyerap aspirasi seputar masalah BPJS, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

Hari itu, dirinya, secara langsung, menyerap aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sukabumi. Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Kang Nandar, yang mendampingi. Begitu dialog dibuka, satu per satu warga menyampaikan persoalan yang selama ini membelit hidup mereka. Tatang, warga Nyalindung, misalnya, mengangkat persoalan klasik tapi tak kunjung tuntas berupa BPJS Kesehatan.

"Saya tidak pernah menunggak bayar BPJS Kesehatan, tapi ketika operasi malah diminta biaya Rp3,5 juta," keluh Tatang, seraya menunjukkan bukti pembayaran. Beberapa warga mengangguk, rupanya bukan hanya dia yang mengalami. Tak hanya soal kesehatan, keluhan juga datang dari bidang pendidikan. Seorang warga lain menyoroti rencana efisiensi anggaran pemerintah pusat yang, menurut mereka, jangan sampai mengorbankan pendidikan.

"Kami berharap khusus program pendidikan justru ditambah. Karena ini untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Apalagi di Kabupaten Sukabumi, masih banyak bangunan sekolah yang perlu perbaikan dan peningkatan fasilitas," katanya. Mendengar itu, Kang Zainul, begitu ia akrab disapa, tampak serius mendengar. Ia pun tak menampik, masalah BPJS kerap menjadi sorotan setiap kali ia turun ke daerah.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB itu pun berjanji akan membawa persoalan ini ke pihak terkait dalam rapat-rapat yang digelar di DPR. "Kalau memang tidak pernah ada tunggakan, tentu ada masalah kalau ternyata harus tetap bayar. Saya meminta ini ditelusuri. Saya meminta Kang Nandar untuk melakukan pendampingan agar masalah ini bisa selesai," ujarnya.

"Ini tentu harus dibenahi. Maka, kami terus dorong BPJS Kesehatan untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat," imbuhnya. Terkait kekhawatiran efisiensi anggaran, Kang Zainul menegaskan masyarakat tak perlu cemas berlebihan. Menurutnya, efisiensi hanya diterapkan pada program-program yang dinilai kurang mendesak, sementara kebutuhan fisik seperti pembangunan sekolah tidak akan terdampak.

Meski demikian, ia mengakui efisiensi anggaran ini tetap akan menjadi atensi khusus. "Dampak efisiensi ini memang besar, tapi untuk pembangunan yang bersifat fisik dan strategis, itu tidak masuk daftar efisiensi," tegas legislator daerah pemilihan Jawa Barat IV itu.

 um/mh



FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi VII DPR RI, Dina Lorenza, saat membuka *workshop* pariwisata di Situbondo sekaligus menyerap aspirasi warga.

Dina Lorenza Buka *Workshop* Pariwisata

Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza, melaksanakan kegiatan reses sekaligus membuka *workshop* bertema Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Melalui Penguatan Konten dan Fotografi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Maret 2025 lalu.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Di sela-sela agenda *workshop*, terselenggara dialog interaktif antara masyarakat

dan Dina Lorenza. Janur Sasra Ananda, misalnya, menyampaikan aspirasi masyarakat Situbondo yang merindukan hadirnya kembali bioskop di daerah mereka.

"Masyarakat Kabupaten Situbondo sudah kepingin punya bioskop lagi. Sudah lama sejak

bioskop terakhir tutup, dan kini kami harus ke kabupaten tetangga hanya untuk menonton film. Mbak Dina Lorenza ini kan mantan pemain film, Insyaallah punya banyak relasi di Jakarta. Kami berharap beliau bisa bantu mencarikan investor atau jaringan bioskop yang bisa membuka cabang di Situbondo," ungkap Janur.

“

Masyarakat Kabupaten Situbondo sudah kepingin punya bioskop lagi.

Menurut Janur, lokasi strategis untuk pembangunan kembali bioskop berada di bekas gedung bioskop di kawasan Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji. Ia menyatakan bahwa pihak pengelola lokasi pun siap untuk bekerja sama jika ada inisiatif pembangunan.  pun/mh

Saadiyah Uluputty

Ajak Masyarakat Hidupkan Masjid Sebagai Pusat Kebaikan

Anggota DPR RI Fraksi PKS Saadiyah Uluputty hadir dalam peringatan Tahun Baru Hijriah dan Hari Asyura, 10 Muharram 1447 H yang diselenggarakan di Masjid Al Hijrah, Kampung Ohlu, Batumerah, Kota Ambon.

Dalam acara yang sarat nilai spiritual ini, Saadiyah memberikan sambutan dan mengajak masyarakat menjadikan masjid sebagai pusat ibadah sosial yang hidup dan membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar.

"Masjid bukan sekadar tempat shalat, tetapi juga pusat kegiatan sosial yang membawa manfaat luas. Di momen penuh keberkahan ini, kita

diajarkan untuk berbagi, menebar kasih sayang, dan mempererat tali silaturahmi. Jika masjid-masjid kita aktif dengan kegiatan seperti ini, insyaallah keberkahan akan turun, karena di masjid lahir pribadi-pribadi bertakwa yang membawa kebaikan untuk daerahnya," tutur Saadiyah dalam rilisnya.

Kegiatan ini turut diisi tausiah oleh Imam Musonep yang juga Ketua YBM PLN Provinsi Maluku. Dalam



Anggota DPR RI Fraksi PKS Saadiyah Uluputty.

tausiahnya, beliau mengajak jamaah untuk memaknai Hari Asyura sebagai momentum untuk memperkuat keimanan dan meneladani kisah-kisah para nabi yang penuh keteguhan, serta memperbanyak amal kebaikan.

Selain itu, acara ini juga menjadi acara penuh kebahagiaan dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dan dhuafa, hasil kerja sama Majelis Taklim Silaturahmi dengan YBM PLN Provinsi Maluku. Kegiatan ditutup dengan doa penuh haru yang dipimpin Imam Masjid Al Hijrah. gal/mh



Anggota DPR RI, Saadiyah Uluputty, mengajak masyarakat untuk menghidupkan masjid sebagai pusat kebaikan dan keberkahan, melalui peringatan Tahun Baru Hijriah dan Hari Asyura di Masjid Al Hijrah, Kota Ambon.

Dewi Coryati

Dorong Pelestarian Musik Dol Bengkulu

Politisi Fraksi PAN Dewi Coryati menghadiri Semarak Budaya Festival Dol 1 di Aula Kampus STIA Bengkulu. Festival yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) ini, menghadirkan tujuh sanggar dol dari berbagai wilayah di Bengkulu. Acara ini menjadi langkah konkret pelestarian alat musik tradisional khas daerah.

Dewi mengatakan bahwa budaya dol merupakan ciri khas yang membedakan Bengkulu dari daerah lain. "Musik dol bukan sekadar pertunjukan, tetapi memiliki nilai ritual yang mendalam," ujar legislator Dapil Bengkulu ini.

Ia juga menjelaskan bahwa dol merupakan hasil asimilasi budaya asing dengan lokal yang telah menyatu dalam identitas budaya Bengkulu.

Bahkan, menurutnya, alat musik dol adalah salah satu dari empat jenis alat musik serupa yang ada

di dunia, salah satunya di Jepang, dan satu lagi ada di Indonesia, yakni di Bengkulu. "Ini membuat kita bangga. Musik dol bukan lagi milik orang lain, melainkan milik kita. Maka penting menjaga keaslian ritme dan fungsinya agar tidak sembarangan dipertunjukkan di luar konteks budaya," tambah Dewi.

Dalam acara tersebut juga dibahas pentingnya memahami dasar pukulan dol, seperti "mempadah", yang merupakan ketukan dasar musik dol dalam upacara adat. Ia pun mengingatkan agar kreativitas dalam musik dol tetap memperhatikan nilai dan pakem budaya, agar tidak kehilangan identitas aslinya.

Lebih jauh, Dewi berharap musik dol tidak hanya dikenal di kawasan tertentu saja seperti Kota Lama dan Berkas, tetapi dapat menyebar ke seluruh Provinsi Bengkulu melalui pendidikan di sekolah-sekolah. "Mari kita dorong bersama agar dol menjadi bagian dari pendidikan dan kebudayaan formal, supaya anak cucu kita nanti tahu, memahami, dan bangga akan warisan budaya ini," pungkasnya. bia/mh



Anggota DPR RI Fraksi PAN, Dewi Coryati, menghadiri Festival Dol di Bengkulu untuk mendorong pelestarian musik tradisional dol sebagai identitas budaya khas daerah.

FOTO: IST/VEL

Festival Literasi Parlemen 2025: Edukatif dan Rekreatif

Hari itu, suasana berbeda terasa di lantai dua Perpustakaan DPR RI. Nuansa buku, pengetahuan, dan kreativitas menyatu dalam harmoni yang hidup. Dalam rangka memperingati dan menguatkan peran penting literasi dalam demokrasi, Perpustakaan DPR RI kali pertama menggelar Festival Literasi Parlemen 2025 dengan tajuk “Literasi Demokrasi dan Kreativitas di Parlemen: Membangun Demokrasi Melalui Buku dan Pengetahuan” yang dilaksanakan pada Juni 2025 lalu.



Anggota DPR RI Rieke Diaj Pitaloka (1) dan JJ. Rizal (2) berpose bersama Deputi Persidangan Kepala Biro Protokol dan Humas.

Dalam laporan penyelenggaraan festival, Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Najib Ibrahim yang juga Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan, Festival Literasi menjadi wadah bertemunya para pemangku kepentingan literasi

mulai dari penerbit, komunitas literasi, klub buku, hingga masyarakat umum melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan rekreatif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Deputy Persidangan DPR RI Suprihartini.

“Laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang pertama bahwa Perpustakaan

DPR RI ini menyelenggarakan kegiatan Festival Literasi Parlemen sebagai wadah literasi demokrasi dan kreatifitas yang akan mempertemukan berbagai pemangku literasi, penerbit, komunitas, dan publik melalui berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif sebagai wujud kepedulian



Ketua Panitia Festival Literasi Parlemen 2025 Najib Ibrahim dalam Festival Literasi Parlemen 2025 di Perpustakaan DPR RI, Rabu (25/6/2025).

dan kolaborasi pengetahuan serta literasi di Lembaga DPR RI ini," ujar Najib di Ruang Perpustakaan DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik, seperti pameran literasi dan board game di ruang utama perpustakaan. Rangkaian acaranya di lantai dua berupa meet and greet penulis, pemutaran film, lomba komisi, lomba puisi, bliblio battle, penampilan akustik, hingga layar tontonan edukatif. Tercatat sebanyak 33 peserta mengikuti lomba puisi,

“

Tujuan utama kegiatan ini, untuk meningkatkan minat baca & budaya literasi di lingkungan Parlemen

Najib Ibrahim
Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI

sementara 12 peserta turut ambil bagian dalam lomba bliblio battle.

Tujuan utama kegiatan ini, menurut Najib, pertama, untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di lingkungan parlemen. Kedua, memperkenalkan Perpustakaan DPR RI sebagai pusat literasi parlemen. Ketiga, menjadi ajang kolaborasi antarunit kerja, komunitas literasi, dan publik. Keempat, mempromosikan serta mendokumentasikan karya insan parlemen dalam repositori DPR RI.

Rangkaian kegiatan Festival Literasi Parlemen ini juga disiarkan langsung melalui kanal digital milik Biro Pemberitaan Parlemen, termasuk Instagram dan YouTube resmi Perpustakaan DPR RI, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas secara inklusif. Menutup laporannya, Najib menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim penyelenggara, pustakawan, serta semua pihak yang telah terlibat aktif dalam menyukseskan kegiatan yang dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, sejarawan JJ Rizal, dan segenap pejabat struktural di lingkungan DPR, MPR, serta pustakawan dan komunitas literasi.

Festival ini juga turut dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, antara lain JFT Pratama Anis Mayangsari, Kepala Biro Humas MPR, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Mohammad Djazuli, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, Inspektur I Asep Ahmad Saefulloh, Kepala Biro BKSAP serta Kepala Bagian Perpustakaan DPR RI Muhammad Yus Iqbal.

Perpustakaan DPR Sebagai Pusat Literasi

Festival Literasi Parlemen 2025 secara resmi dibuka oleh Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini. Dalam kesempatan itu, DPR RI berkomitmen kuat dalam memperkuat budaya baca, demokrasi, dan kolaborasi



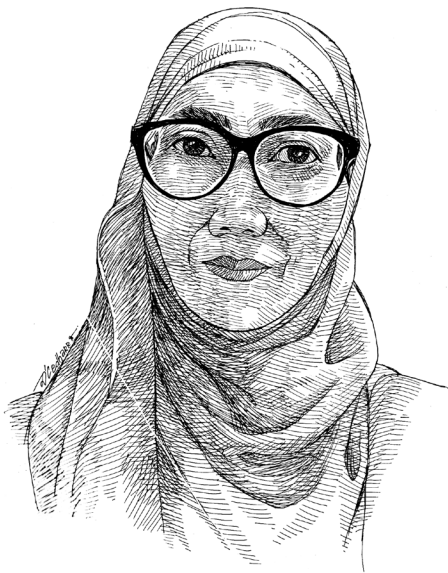
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini saat membuka Festival Literasi Parlemen 2025 di Ruang Perpustakaan DPR RI, Rabu (25/6/2025).

pengetahuan. Suprihartini menegaskan, pentingnya literasi sebagai landasan mendasar dalam menunjang pelaksanaan fungsi utama DPR RI.

"Literasi menjadi kunci penting dalam mendukung fungsi parlemen, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Perpustakaan DPR RI memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pengetahuan bagi anggota dewan, pegawai, dan masyarakat," ungkapnya.

Festival ini, lanjut Suprihartini, merupakan ajang literasi demokrasi dan kreativitas yang dirancang untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari penerbit, komunitas literasi, penggiat budaya, hingga publik melalui kegiatan edukatif, ekonomis, dan rekreatif.

Suprihartini juga menyampaikan harapan agar Festival Literasi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Muhammad Yus Iqbal, Kepala Bagian Perpustakaan DPR RI, atas inisiatif dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam mendorong kolaborasi literasi di lingkungan Setjen DPR RI. hir/mh



Oleh:
Siti Hasanah
Bidan Praktik Mandiri
di Tangerang Selatan
Mahasiswa Profesi Bidan
STIKES Pelita Ilmu

Jika sebelumnya buku KIA terdiri dari 110 halaman, kini jumlahnya bertambah menjadi 154 halaman. Penambahan ini tentu bukan sekadar soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Informasi yang tersedia di dalamnya jauh lebih kaya dan relevan dengan kebutuhan kesehatan ibu dan anak masa kini. Buku KIA edisi 2024 ini akan diperkenalkan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia, mengikuti kesiapan masing-masing fasilitas layanan kesehatan.

Mengenal Buku KIA

Buku KIA atau sering juga disebut “buku pink”, adalah buku catatan yang diberikan kepada setiap ibu hamil di Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai panduan kesehatan ibu dan anak, mulai dari masa kehamilan, proses persalinan serta tumbuh kembang anak hingga usia 6 tahun. Di dalamnya tercantum berbagai

Buku Kesehatan Ibu Anak: Bukan Buku Pink Biasa

Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah resmi meluncurkan versi terbaru dari Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada tahun 2024. Versi terbaru ini mengalami pembaruan signifikan, baik dari segi tampilan, konten, hingga ada fitur interaktif.

informasi penting, seperti jadwal pemeriksaan kehamilan, catatan imunisasi, dan grafik pertumbuhan anak.

Cikal bakal Buku KIA sudah ada sejak tahun 1994, namun Buku KIA sendiri baru diperkenalkan secara nasional pada tahun 2004. Kehadiran Buku KIA diperkuat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/SK/III/2004. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa buku KIA harus diperbarui minimal setiap lima tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

Kenapa Buku KIA Penting?

Buku KIA bukan sekadar catatan medis, tapi juga menjadi dokumen pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Catatan di dalamnya dimulai dari usia kandungan ibu yang artinya dapat memberikan informasi riwayat sejak sebelum anak lahir. Selain itu, buku ini juga bermanfaat sebagai rujukan untuk kehamilan berikutnya, karena mencatat kondisi ibu selama



kehamilan terdahulu.

Manfaat lain yang sangat penting adalah sebagai indikator intervensi dini. Artinya, bila ada kelainan atau hambatan dalam tumbuh kembang anak atau masalah kehamilan, maka bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Ini tentu memerlukan peran aktif dari ibu maupun keluarga dalam mengisi dan memantau isi buku secara berkala.

Bagi ibu baru, buku ini menjadi panduan lengkap dan terpercaya apalagi di tengah lautan informasi yang kadang simpang siur di internet. Informasi yang ada di dalamnya tersusun sistematis dan berbasis evidensi medis, serta disusun oleh para ahli.



Buku KIA harus diperbarui minimal setiap lima tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

Keunggulan Buku KIA Edisi 2024

Ada banyak hal baru yang membuat Buku KIA versi 2024 ini semakin relevan dengan generasi muda, baik milenial maupun Gen Z. Desain lebih clean & chic: Tampilan buku lebih modern, rapi, dan mudah dibaca. Ini membuat penggunaannya lebih menyenangkan dan tidak terasa seperti dokumen medis yang kaku.

Semakin Banyak Lembar Pemantauan Mandiri Buku ini menyediakan lembar isian yang bisa diisi langsung oleh ibu atau keluarga. Ini mendorong partisipasi aktif dalam memantau kesehatan ibu hamil dan perkembangan anak, bukan hanya mengandalkan tenaga medis. Bagian yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan juga dipisahkan dengan jelas, sehingga tidak membingungkan saat membaca atau mengisi.

Dilengkapi QR Code dan Tautan Referensi

Salah satu fitur menarik yang ada di Buku KIA versi terbaru adalah adanya kode QR yang mengarahkan ke laman resmi Kemenkes atau platform layanan terkait. Misalnya, bagian menyusui pada bayi usia 0–6 bulan memiliki QR yang

menghubungkan langsung ke layanan telekonseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Ada juga QR yang mengarahkan ke buku resep MPASI, dengan koleksi resep yang lebih lengkap dan variatif.

Versi Digital Bisa Diunduh

Jika sulit mendapatkan buku fisik, masyarakat tetap bisa mengakses versi digital. Hal ini menjadi solusi praktis terutama di wilayah yang distribusi fisiknya belum merata. Buku KIA versi digital bisa didapatkan langsung di situs resmi Kementerian Kesehatan RI.

Tips Memanfaatkan Buku KIA

Dapatkan Buku KIA di fasilitas kesehatan masyarakat seperti Puskesmas atau Posyandu. Adapula bidan praktik, klinik bersalin, dan rumah sakit yang juga menyediakan Buku KIA, namun penyebarannya belum merata.

Selalu bawa buku ini ke mana pun saat kontrol kehamilan atau imunisasi anak. Tidak masalah apabila berpindah faskes. Aktif melakukan pengisian mandiri untuk memantau kesehatan ibu hamil maupun perkembangan anak. Tandai bagian-bagian penting dan jangan ragu untuk bertanya ke bidan atau dokter terkait isi buku ini.

Buku KIA bukan sekadar “kartu kontrol” atau catatan imunisasi semata, tapi juga alat komunikasi dan edukasi antara ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan. Untuk menjadikannya efektif maka perlu peran aktif dari ibu, ayah, bahkan anggota keluarga lainnya.

Buku ini bisa menjadi bekal berharga untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan bahagia jika dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini bukan buku pink biasa, tapi teman perjalanan tumbuh kembang si kecil dan sahabat bagi setiap ibu. 🌱





Melaju ke Masa Lalu: Ambarawa dan Romantika Kereta Tempo Dulu

Lokomotif bergerak perlahan seraya menggandeng gerbong kayu yang usianya lebih dari seabad. Di dalamnya, puluhan orang bersiap untuk napak tilas di jalur tua nan indah dari Stasiun Ambarawa ke Stasiun Tuntang dan sebaliknya.

Kereta api wisata merupakan atraksi paling menarik yang ada di Museum Kereta Api Indonesia. Bagai portal waktu, museum yang terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akan membawa siapa saja yang datang untuk lebih dekat dengan perkeretaapian di Indonesia dari berbagai latar zaman.

Museum Kereta Api Indonesia menempati bekas Stasiun Willem I yang mulai beroperasi pada 1873. Untuk menikmati koleksi museum ini, pengunjung diharuskan membayar tiket seharga Rp20.000 (dewasa dan mahasiswa) atau Rp10.000 (anak-anak dan pelajar).

Masuk ke area museum, terdapat lorong lini masa perkeretaapian di Nusantara. Cerita pembangunan jalur kereta pertama di masa kolonial Belanda, transformasi PT KAI dengan segala layanannya, hingga cerita tentang MRT, LRT, dan kereta cepat yang menjadi inovasi terkini terpampang runut dan apik.

Di area eksepsi, terdapat beberapa lokomotif uap yang telah purna tugas puluhan tahun lalu. Museum ini memiliki sekitar 26 lokomotif uap termasuk dua unit lokomotif uap langka kelas B25 buatan Esslingen dan B 5112 buatan Hanomag yang berhasil dihidupkan kembali.

Museum Kereta Api Indonesia

juga menyimpan koleksi lokomotif diesel. Di area koleksi statis, terdapat loko diesel CC200 yang digadang menandai modernisasi perkeretaapian Indonesia sekaligus turut andil dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Sedangkan loko D300 dan D301 masih bertugas sebagai penarik kereta wisata di Museum Kereta Api Ambarawa.

Museum juga memperkaya koleksinya dengan gerbong yang didapat dari berbagai daerah. Pengunjung bisa menjelajah langsung lokomotif dan gerbong-gerbong tua yang ada di area ini. Petualangan tentu tak terhenti pada koleksi kereta. Di sisi lainnya, pengunjung dapat melihat halte Cicayur dan Cikoya dari



jalur Rangkasbitung serta beberapa halte kayu dari jalur Purwosari–Wonogiri. Tak kalah menarik, ada pemutar rel yang digunakan untuk mengubah arah lokomotif maupun gerbong.

Beberapa ruangan juga digunakan untuk menyimpan benda-benda historis seperti peralatan pencetak tiket, sistem persinyalan mekanik. Tak lupa atribut administratif dari zaman Staatsspoorwegen (SS), Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), hingga Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) juga turut dipamerkan.

Menapaki Rute Ambarawa - Tuntang

Jika datang di akhir pekan, pengunjung memiliki kesempatan menjajal langsung rute lawas Ambarawa - Tuntang yang melintasi sisi Danau Rawa Pening menggunakan kereta wisata. Lokomotif bernomor D 300 23 dan D 301 24 secara bergantian melayani jalur sepanjang 6 km. Lokomotif dengan livery kuning-hijau khas PJKA itu menggandeng 2-3 gerbong kayu berkapasitas hingga 40 orang yang telah beroperasi sejak tahun 1907.

Perjalanan menuju Stasiun Tuntang menghabiskan sekitar



30 menit, begitu pula sebaliknya. Pengunjung dipersilakan turun sejenak untuk berfoto dan menjelajah area stasiun Tuntang sebelum kembali ke Stasiun Ambarawa.

Tiket kereta wisata Museum Kereta Api Indonesia rute Ambarawa - Tuntang PP dibanderol seharga Rp100.000-Rp125.000 tergantung hari keberangkatan. Karena kereta ini tidak beroperasi setiap hari, pengunjung bisa mengecek langsung jadwal keberangkatan melalui akun instagram @wisata.museumkeretaapiambarawa.

Di bulan Juni 2025, Museum



Kereta Api Indonesia kembali menghadirkan layanan KA Wisata Uap "Baru Klinthing". Layanan premium ini hanya tersedia satu kali dalam sebulan dengan keberangkatan pukul 13.30.

Untuk merasakan petualangan unik bersama loko uap B 5112 ini pengunjung harus merogoh kocek untuk tiket seharga Rp395.000 - Rp495.000 per orang. Maklum saja, loko jenis ini memerlukan kayu jati sebagai bahan bakar memanaskan ketelnya. Harga tiket tersebut juga sudah termasuk tiket museum, pemandu wisata dan snack.  UC

Ayo..... Sekolah!!!

Narasi: Naefuroji • Foto: Oji, Dep, Jaka, Runi, Farhan





Pagi itu, matahari seakan menyambut semangat baru, membangkitkan rasa penasaran dan sedikit kecemasan di hati para siswa, terutama siswa baru.

Suasana sekolah yang biasanya sepi, kini riuh oleh hiruk pikuk siswa yang kembali bertemu teman lama dan berkenalan dengan wajah-wajah baru.

Bagi siswa baru, hari pertama sekolah adalah petualangan yang penuh dengan hal baru. Bangunan sekolah yang megah, lorong-lorong yang belum mereka kenal, serta guru-guru yang akan membimbing mereka, semua terasa asing namun menarik. Ada yang merasa gugup, ada yang malu-malu, namun ada pula yang sudah tidak sabar ingin segera mengeksplorasi lingkungan sekolah.

Hari pertama, biasanya sekolah mengadakan berbagai kegiatan untuk menyambut siswa baru. Upacara bendera menjadi momen sakral untuk memulai tahun ajaran baru. Setelah itu, siswa baru akan diperkenalkan dengan

lingkungan sekolah, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, hingga fasilitas lainnya. Tak jarang, ada pula kegiatan pengenalan antarsiswa dan guru, serta pemberian informasi tata tertib dan kegiatan sekolah.

Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu adalah berkenalan dengan teman baru. Di hari pertama, siswa akan mulai membangun hubungan dengan teman-teman sekelas, mencari teman sebangku, hingga berinteraksi dalam berbagai kegiatan kelompok. Tawa dan canda akan mulai terdengar, menandakan dimulainya jalinan persahabatan yang baru.

Semoga hari pertama masuk sekolah ini menjadi awal yang manis bagi seluruh siswa, dan menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Selamat menempuh tahun ajaran baru! 🍀







JURUS JAGA EKONOMI TETAP STABIL



Alfath Rizqi
Host

Elisa Purba
Host

Didik Haryadi
Anggota Komisi XI DPR RI

Eko Listiyanto
Pengamat Ekonomi

SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI

[HTTPS://TVMPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvmparlemen.dpr.go.id)



TVR PARLEMEN